

SKRIPSI

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KUPS MADU KTH MEGA BUANA DESA PACEKKE KABUPATEN BARRU

KHUSNUL KHOTIMAH

105951104921



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

SKRIPSI

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KUPS MADU KTH MEGA BUANA DESA PACEKKE KABUPATEN BARRU

KHUSNUL KHOTIMAH

105951104921

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan

Strata Satu (S-1)

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Strategi Pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke Kabupaten Barru

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 105951104921

Jurusan : Kehutanan


Fakultas : Pertanian

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Ir. Hikmah, S.Hut, M.Si., IPM.
NIDN : 0011077101


Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM.
NIDN : 0907028202

Diketahui:

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Program Studi


Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.
NIDN : 0926036803


Ir. Jauhar Mukti, S.Hut., M.Hut., IPM.
NIDN : 0921029002

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Strategi Pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke Kabupaten Barru

Nama : Khusnul Khotimah

Nim : 105951104921

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Dr. Ir. Hikmah, S.Hut, M.Si., IPM.
Pembimbing I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM.
Pembimbing II

Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., MP., IPM.
Penguji I

Rahmat Ariandi, S.Hut., M.Hut.
Penguji II

Tanggal Lulus: 09 Agustus 2025

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Strategi Pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke Kabupaten Barru” adalah benar merupakan hasil karya belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang bersal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian terakhir skripsi ini.

Makassar, Agustus 2025


Khushul Khotimah
105951104921

ABSTRAK

Khusnul Khotimah. Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Strategi Pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke Kabupaten Barru. Dibimbing oleh **Hikmah** dan **Hasanuddin Molo**

Program Perhutanan Sosial adalah upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar bisa mengelola hutan secara sah dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program Perhutanan Sosial berhasil dijalankan dan menyusun strategi pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu di KTH Mega Buana, Desa Pacekke, Kabupaten Barru. Penelitian ini dilakukan dengan metode mixmetod dengan jumlah responden sebanyak 15 orang, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan deskripsi statistik sederhana dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini dikategori “cukup berhasil” yaitu dengan capaian indeks keberhasilan sebesar 62,8%. Dalam merumuskan strategi pengembangan KUPS Madu, menghasilkan beberapa rekomendasi, seperti mengembangkan produk madu khas lokal dengan kualitas tinggi untuk menjangkau pasar digital. Mengakses bantuan permodalan untuk peningkatan sarana produksi dan pengemasan. Diversifikasi produk olahan madu (misal: madu herbal, lilin lebah, propolis) untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas utama. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga riset atau universitas untuk pengembangan teknologi budidaya lebah.

Kata Kunci: *Perhutanan Sosial (PS), Tahapan Program Perhutanan Sosial, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Strategi Pengembangan KUPS*

ABSTRACT

Khusnul Khotimah. *Analysis of the Success of the Social Forestry Program and the Development Strategy of the Mega Buana Honey Farming Community (KUPS) in Pacekke Village, Barru Regency. Supervised by Hikmah and Hasanuddin Molo.*

The Social Forestry Program is an effort to empower communities surrounding forests so they can manage forests legally and sustainably. This study aims to evaluate the success of the Social Forestry program and develop a development strategy for the Honey Social Forestry Business Group (KUPS) in KTH Mega Buana, Pacekke Village, Barru Regency. This study was conducted using a mixed-method method with 15 respondents. Data collection techniques used questionnaires, interviews, and observations. Data analysis used simple statistical descriptions and SWOT. The results showed that this program was categorized as "quite successful" with a success index of 62.8%. In formulating the KUPS Honey development strategy, several recommendations were made, such as developing local, high-quality honey products to reach the digital market. Accessing capital assistance to improve production and packaging facilities. Diversifying processed honey products (e.g., herbal honey, beeswax, propolis) to reduce dependence on one main commodity. Establishing collaboration with research institutions or universities to develop beekeeping technology.

Keywords: *Social Forestry (PS), Stages of the Social Forestry Program, Social Forestry Business Groups (KUPS), KUPS Development Strategy*

PRAKATA

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu kita nantikan.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Kehutanan Strata satu (S-1). Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak terlibat yang ikut memberikan dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penelitian, terutama kepada :

1. Orang tua dan Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada saya. Bapak penulis Ahcmad Mendemme' dan ibu penulis Sitti Noni Patabang trimakasi atas didikan dan doanya kepada penulis. Kakak penulis Abdul Sofian Mangngori dan Abdul Rahmat Palisu trimakasih atas subangan finansialnya selama penulis menemba Pendidikan S1.
2. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM. selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan terkait penyusunan Skripsi serta pengetahuan dan motivasinya.
3. Bapak Dr. Ir. Hasanuddin, S.Hut., M.P., IPM. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan terkait penyusunan Skripsi serta pengetahuan dan motivasinya.
4. Ibu Dr. Ir. Irma Sribianti, S.Hut., M.P., IPM selaku penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran terkait penyusunan Skripsi ini.

5. Bapak Rahmat Ariandi., S.Hut., M.Hut selaku penguji 2 juga yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran terkait penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Akademik yang telah memberikan dukungan.
7. Teman-teman penelitian di Desa Paccekke Kurni, Afifa, Egi, Antan, dan Mimi, terima kasih atas kerjasamanya dan kekompakannya selama penelitian di Desa Paccekke. Warga lokal bapak Lahadi dan bapak/ibu dusun Kading trimakasih sudah memberikan tempat tinggal dan dampungannya selama penelitian di Desa Paccekke.
8. Teman-teman Kehutanan Merawan 21 yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Tetaman-teman Penjelajah Ilmiah UKM LKIM-PENA yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan bagi penulisan di Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Makassar, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN KOMISI PENGUJI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| PRAKATA..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 4 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Perhutanan Sosial | 5 |
| 2.2. Tahapan Program Perhutanan Sosial | 7 |
| 2.3. KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) | 10 |
| 2.4. Penelitian Relavan | 11 |
| 2.5. Kerangka Pikir..... | 13 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 14 |

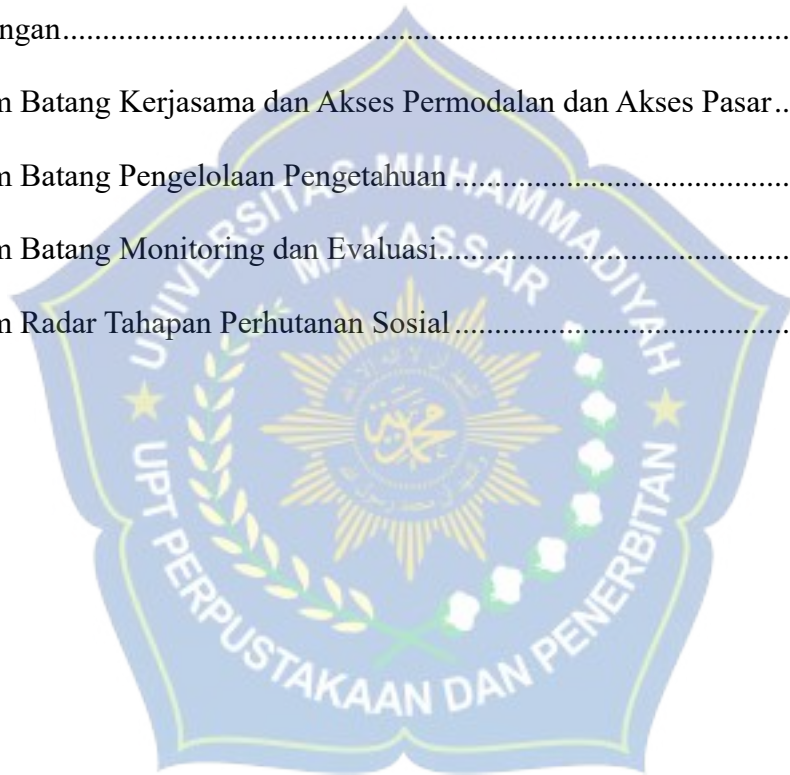
| | |
|--|----|
| 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian | 14 |
| 3.2. Penentuan Sampel..... | 14 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data..... | 14 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 19 |
| 3.5. Analisis Data..... | 20 |
| IV. KEADAAN UMUM LOKASI..... | 24 |
| 4.1. Letak dan Luas Wilayah | 24 |
| 4.2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat..... | 25 |
| 4.3. Kondisi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana | 25 |
| 4.4. Kondisi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu..... | 26 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 27 |
| 5.1. Identifikasi Responden | 27 |
| 5.2. Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial..... | 31 |
| 5.3. Strategi Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana..... | 41 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 46 |
| 6.1. Kesimpulan | 46 |
| 6.2. Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | 48 |
| LAMPIRAN..... | 50 |

DAFTAR TABEL

| No | Teks | Halaman |
|-----|---|---------|
| 1. | Penelitian Relavan..... | 11 |
| 2. | Skor Kuesioner..... | 21 |
| 3. | Indeks Keberhasilan Program | 21 |
| 4. | Tabel SWOT..... | 23 |
| 5. | Struktur Organisasi KUPS Madu KTH Mega Buana | 26 |
| 6. | Tingkatan Umur Responden..... | 27 |
| 7. | Tingkatan Pendidikan Responden..... | 28 |
| 8. | Tanggungan Keluarga | 29 |
| 9. | Kondisis Lahan Responden..... | 30 |
| 10. | Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial | 31 |
| 11. | Analisis SWOT..... | 44 |

DAFTAR GAMBAR

| No | <i>Teks</i> | Halaman |
|----|---|---------|
| 1. | Kerangka Pikir | 13 |
| 2. | Diagram Batang Pendampingan Tahapan Awal | 32 |
| 3. | Digram Batang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan HUtan dan Lingkungan..... | 34 |
| 4. | Diagram Batang Kerjasama dan Akses Permodalan dan Akses Pasar | 35 |
| 5. | Diagram Batang Pengelolaan Pengetahuan | 37 |
| 6. | Diagram Batang Monitoring dan Evaluasi..... | 38 |
| 7. | Diagram Radar Tahapan Perhutanan Sosial | 39 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | Teks | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Kuesioner dan Instrumen Wawancara..... | 50 |
| 2. | Data Identitas Responden..... | 54 |
| 3. | Data Hasil Wawancara Kuesioner..... | 55 |
| 4. | Surat Izin Penelitian | 56 |
| 5. | Surat Selesai Meneliti | 57 |
| 6. | Surat Bebas Plagiasi..... | 58 |
| 7. | Hasil Uji Plagiasi..... | 59 |
| 8. | SK Kelompok Tani Hutan Mega Buana..... | 65 |
| 9. | SK Pembentukan KUPS Madu KTH Mega Buana..... | 72 |
| 10. | Dokumentasi Kegiatan | 75 |

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perhutanan sosial telah menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan (Faizal et al., 2023). PERMEN LHK RI No. 9 Tahun 2021 Pasal 1 (12) yaitu “Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya” (PermenLHK, 2021). Berdasarkan PERMEN tersebut dapat diartikan bahwa kawasan hutan yaitu milik negara dipergunakan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan, dengan salah satu program pemberdayaan yaitu Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah program pemberdayaan yang melibatkan 3 kelompok yaitu kelompok masyarakat, mitra, dan pemerintah. Perhutanan sosial di Indonesia sudah mulai diterapkan sejak tahun 2007 namun penerapan secara masif baru dilaksanakan pada tahun 2014 pada periode presiden ke-7 (Pambudi, 2023). Berdasarkan Siaran Pers Nomor: SP.441/HUMAS/PPIP/HMS.3/12/2023, sepanjang tahun 2023 program Perhutanan Sosial berhasil membuka akses pengelolaan hutan seluas 6.371,42 hektar. Program ini didukung oleh 9.642 unit Surat Keputusan dan telah memberi manfaat langsung bagi sekitar 1.287.710 kepala

keluarga di seluruh Indonesia (Bakri et al., 2024). Sehingga program Perhutanan Sosial menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di bagian pedalaman Indonesia terkhusus di daerah pinggiran hutan. Salah satu daerah memiliki lokasi yang strategis dalam pengimplementasian Perhutanan sosial yaitu Kabupaten Barru .

Kabupaten Barru adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep dan Kota Pare-pare. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, luas wilayahnya mencapai 1.174,72 km² atau sekitar 2,51% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kondisi tutupan lahan yang masih tergolong hutan sedang, Barru memiliki potensi besar untuk dijadikan contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten ini terdiri dari 7 kecamatan, 40 desa, dan 15 kelurahan. Salah satu wilayah yang telah mendapatkan izin pengelolaan hutan lindung melalui skema Perhutanan Sosial adalah Desa Pacekke di Kecamatan Soppeng Riaja, melalui program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Desa Pacekke salah satu desa tempat terbentuknya KTH (Kelompok Tani Hutan) yaitu KTH Mega Buana yang memiliki KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Madu dibentuk pada tanggal 20 Januari 2021. Berdasarkan hasil penelitian Rahmat, 2024 pada KUPS Madu KTH Mega Buana layak untuk dipertahankan dan dikembangkan karena memiliki nilai RBC rata-rata sebesar 13,77. Namun, apakah kelayakan usaha tersebut merupakan keberhasilan dari tahapan Program Perhutanan Sosial yang telah diterapkan di Kabupaten Barru, masih harus diteliti.

Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial dan Strategi Pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke Kabupaten Barru” yang dapat mendukung keberlanjutan program Perhutanan Sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif untuk mendorong pengembangan program perhutanan sosial di Kabupaten Barru..

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keberhasilan Program Perhutanan Sosial di Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana Desa Pacekke, Kabupaten Barru.
2. Strategi apa yang dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana Desa Pacekke, Kabupaten Barru.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui keberhasilan Program Perhutanan Sosial di KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke, Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana Desa Pacekke, Kabupaten Barru.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari sisi teori, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang bagaimana tahapan perhutanan sosial dapat berhasil, khususnya dalam pengembangan KUPS Madu di KTH Mega Buana. Sedangkan manfaat dari aspek praktis yaitu dapat menjadi strategi bagi pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan serta mengoptimalkan postensi usaha berbasis hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat, berbasis data, dan berkelanjutan untuk pengembangan program Perhutanan Sosial di wilayah lain dengan potensi serupa. Demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pelestarian hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dan keberlanjutan program Perhutanan Sosial di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial memberikan masyarakat lokal akses legal untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Tujuan program Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketidaksamaan dalam penguasaan lahan, dan mendukung konservasi lingkungan. Lima skema perhutanan sosial yang diakui di Indonesia, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat (Jamika *et al.*, 2023).

Pengelolaan hutan, istilah "perhutanan sosial" mengacu pada metode yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam segala hal, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Ini termasuk hak akses legal terhadap sumber daya hutan, yang memungkinkan komunitas mengelola kayu dan hasil hutan bukan kayu serta kegiatan konservasi. Hak masyarakat atas hutan yang mereka kelola sangat penting, menurut definisi ini (Sahide *et al.*, 2020).

1. Manfaat Perhutanan Sosial

- a. Kesejahteraan Masyarakat: meningkatkan pendapatan masyarakat lokal adalah tujuan utama perhutanan sosial. Dengan memberikan akses terhadap sumber daya hutan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memanfaatkan kayu dan produk hutan lainnya.

- b. Keberlanjutan Lingkungan: tujuan perhutanan sosial adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Ini dapat mengurangi tekanan terhadap hutan dan meningkatkan upaya konservasi.
- c. Pemberdayaan Masyarakat: perhutanan sosial memberdayakan masyarakat dengan memberikan hak, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya hutan. Pemberdayaan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kendali atas sumber daya yang mereka andalkan.

2. Prinsip Dasar

- a. Partisipasi Masyarakat: masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan hutan. Ini termasuk pengambilan keputusan tentang bagaimana hutan dikelola, apa saja yang dapat dimanfaatkan, dan upaya konservasi yang harus dilakukan.
- b. Hak atas Tanah dan Sumber Daya: mengakui dan melindungi hak masyarakat lokal terhadap tanah dan sumber daya hutan sangat penting untuk mendukung perhutanan sosial karena ini mengurangi konflik dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang bergantung pada hutan.
- c. Pengelolaan Berkelanjutan: dalam perhutanan sosial, praktik pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting. Teknik-teknik ini memastikan bahwa sumber daya hutan dapat digunakan tanpa merusak ekosistemnya dalam jangka panjang.

3. Keuntungan dari Perhutanan Sosial

- a. Konservasi Biodiversitas: masyarakat lokal biasanya sangat memahami ekosistem di sekitar mereka. dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan, perlindungan keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan lebih baik.
- b. Pengurangan Kemiskinan: akses ke sumber daya hutan dapat membantu masyarakat lokal menghasilkan lebih banyak uang melalui kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan hutan, seperti ekoturisme, penjualan produk hutan non-kayu, dan kayu.
- c. Perubahan Iklim: perhutanan sosial dapat membantu dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan menanam pohon dan melindungi hutan dari penebangan liar. Ini dapat dicapai melalui penerapan praktik pengelolaan hutan yang baik.

Perhutanan sosial juga menjadi bagian penting dalam upaya mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, dan perlindungan ekosistem darat, membutuhkan perhutanan sosial (SDG 15).

2.2. Tahapan Program Perhutanan Sosial

Implementasi perhutanan sosial di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan keberhasilannya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Pendampingan Tahap Awal

Dalam program perhutanan sosial, pendampingan tahap awal adalah proses memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat untuk memulai dan mengelola kegiatan perhutanan sosial secara efektif. Pada tahap ini, pendampingan

berfokus pada membuat dasar yang kuat untuk keberlanjutan program. Fasilitator atau tim pendamping yang kompeten melakukan pendampingan ini dan memahami aspek hukum, sosial, dan ekologis pengelolaan hutan (Toha and Wihadanto, 2023).

Berikut adalah beberapa aspek yang dilakukan dalam pendampingan tahap awal program perhutanan sosial:

a. Sosialisasi dan Penyuluhan

Untuk memulai pendampingan, masyarakat di sekitar hutan diberitahu tentang program perhutanan sosial, manfaatnya, serta hak dan kewajibannya. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membantu masyarakat memahami tujuan program dan pentingnya menjaga kelestarian hutan.

b. Identifikasi kelompok masyarakat sasaran

Identifikasi kelompok masyarakat atau individu yang menjadi sasaran akan terlibat dalam program perhutanan sosial adalah bagian dari pendampingan tahap awal. Kelompok ini biasanya adalah komunitas yang tinggal di dekat hutan dan bergantung pada hutan, seperti petani hutan, pengolah kayu, atau pemungut hasil hutan.

c. Pemetaan sumber daya alam

Selain itu, pendampingan melibatkan pemetaan sumber daya alam yang ada di wilayah hutan yang akan dikelola. Pemetaan ini termasuk sumber daya alam yang mungkin ada, seperti tanaman, hasil hutan bukan kayu, dan kondisi ekosistem hutan. Pemetaan ini penting untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan kondisi setempat.

d. Pembinaan aspek legalitas

Pendampingan tahap awal juga membantu masyarakat dalam proses memperoleh izin pengelolaan hutan. Ini mencakup pengurusan izin yang diperlukan untuk pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan

Tahapan Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka dan menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang, sehingga masyarakat yang terlibat dapat mengelola sumber daya hutan dengan cara yang berkelanjutan (Sudarni *et al.*, 2024).

3. Kerja sama dan akses permodalan dan akses pasar

Untuk mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program perhutanan sosial, kerja sama antar berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor swasta, serta akses yang memadai terhadap permodalan dan pasar, sangat penting untuk memberikan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan (Lawasi, 2022).

4. Pengelolaan Pengetahuan

Untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan program perhutanan sosial, pengelolaan pengetahuan sangat penting. Pengumpulan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan data tentang pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah bagian dari pengelolaan pengetahuan ini. Tujuan dari

pengelolaan pengetahuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan dan sumber daya alam secara lebih efisien. Pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan lembaga lainnya bekerja sama untuk berbagi informasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan (Yulia *et al.*, 2024).

5. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi perhutanan sosial adalah proses penting untuk menilai efektivitas, keberlanjutan, dan dampak program perhutanan sosial yang dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal pengelolaan hutan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, proses ini memberikan data yang dapat digunakan untuk memperbaiki program dan membuat kebijakan yang lebih tepat (Azhar, 2021).

2.3. KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) adalah unit usaha yang dibentuk oleh masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mengoptimalkan hasil dari perhutanan sosial. KUPS bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Hidayat dan Trison, 2024).

Peran KUPS dalam program perhutanan sosial adalah membantu dalam beberapa hal yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas Usaha: Memberikan pelatihan dan bimbingan untuk manajemen bisnis berbasis sumber daya hutan.

2. Akses Pembiayaan: Memberikan akses ke sumber pembiayaan seperti koperasi, hibah pemerintah, dan perbankan.
3. Pengembangan Pasar: Membantu memasarkan produk hasil hutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Kolaborasi dengan Stakeholder: Bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan hutan.

2.4. Penelitian Relavan

Tabel 1. Penelitian Relavan

| Nama dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|---------------------------|--|--|
| Azhar, 2021 | Evaluasi Program Perhutanan Sosial Di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses pengajuan izin program perhutanan sosial di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali serta tingkat keberhasilan program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program perhutanan sosial di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dimulai pada tahun 2017 dan melewati beberapa tahapan perizinan. Sketsa wilayah, gambaran sosial ekonomi, dan nama-nama anggota yang akan diterima dan diajukan oleh kepala desa disertakan dalam izin. (2) Program perhutanan sosial Desa Wonoharjo berhasil dalam semua aspek, yaitu teknis, sosial, ekonomi, dan ekologi. |
| Rusadi, 2021 | Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan Di | Menemukan bahwa program ini berhasil dengan skor 2,2. Strategi yang disarankan untuk pengembangan pengelolaan hutan yang efektif mencakup melakukan pertemuan rutin yang melibatkan |

Kecamatan Kindang
Kabupaten
Bulukumba

berbagai pihak, sosialisasi mengenai kebijakan hutan kemasyarakatan, penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi kelompok tani hutan, pemanfaatan lahan, dan bantuan alat ekonomi produktif secara optimal, serta penyusunan master plan untuk objek wisata dan kegiatan perlindungan serta pengamanan hutan secara partisipatif.

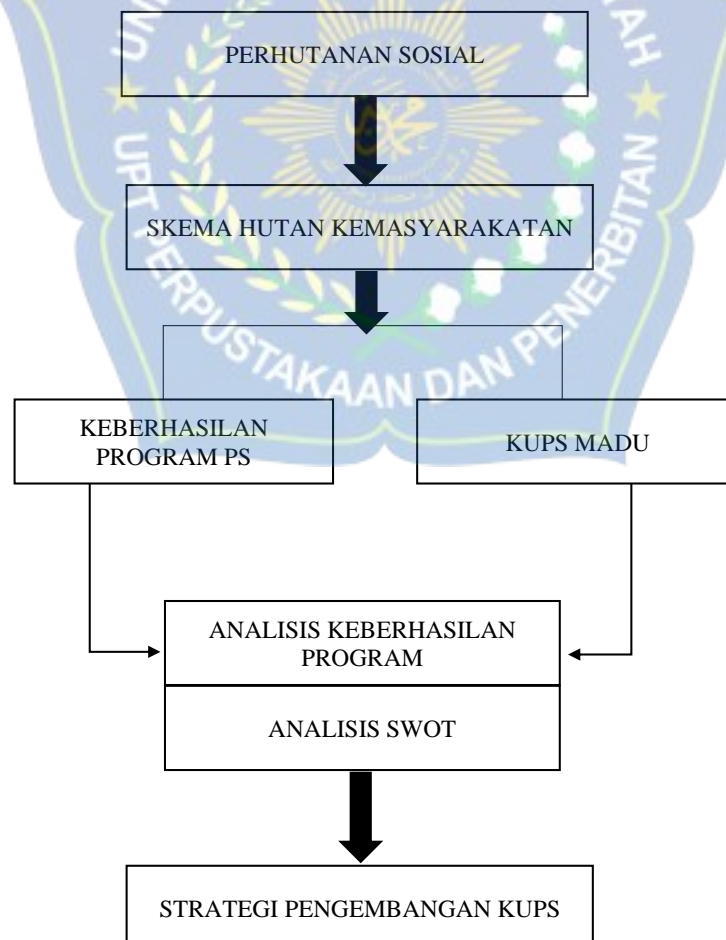
Suryaningsih,
2024

Menghadapi
Tantangan: Analisis
Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi
Keberhasilan
Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial
(KUPS) di
Kabupaten Lima
Puluh Kota
Sumatera Barat

Membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Sejak diterbitkannya Permenlhk P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 mengenai Perhutanan Sosial, jumlah KPS dan KUPS di wilayah tersebut meningkat pesat, seolah-olah seperti jamur di musim hujan. Namun, peningkatan jumlah KUPS ini tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota berkaitan dengan pengembangan komunitas, yang terlihat dari indikator kelompok yang tidak melaksanakan peran dan tanggung jawabnya serta adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan kelompok.

2.5. Kerangka Pikir

Fokus penelitian ini adalah keberhasilan dari program perhutanan sosial dan strategi pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Desa Pacekke memiliki program pemberdayaan berbasis masyarakat yaitu Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). KPS yang dimaksud adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana, KTH Mega Buana memiliki KUPS Madu yang telah di betuk oleh masyarakat dan dibantu pemangku kebijakan dan pendamping PS. KUPS Madu KTH Mega Buana memiliki usaha yaitu Budidaya Lebah Madu Trigona, yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis yang berkelanjutan. Maka dari itu kerangka pikir dapat kita gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Paccekke, Kecamatan Sopeng Riaja, Kaupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pemukiman warga KUPS Madu KTH Mega Buana. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu dari Mei - Agustus 2025.

3.2. Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, merupakan teknik penentuan sampel dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel. Maka dari itu populasi pada penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung dalam KUPS Madu Mega Buana menggunakan metode sampel jenuh dengan jumlah populasi 15 orang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Berikut jenis penelitian dan sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixmetod yaitu kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif sederhana dengan menyajikan data lalu mendeskripsikannya dan analisis SWOT. Metode pendekatan seperti statistik deskriptif sederhana ini adalah aktivitas menghimpunkan, penataan, penyajian, dan peringkasan data agar mudah di baca dan mudah dipahami. Selain itu juga berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data sampel atau populasi (Hadju and Aulia, 2022).

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan melalui kuesioner yang diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keberhasilan program Perhutanan Sosial serta strategi pengembangan KUPS Madu di Kelompok Tani Hutan Mega Buana.

Data primer yang diperlukan dari responden untuk penelitian ini yaitu:

- 1) Informasi tentang responden meliputi nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal, tingkat pendidikan terakhir, jenis komoditas yang diusahakan, serta status kependudukan mereka.
- 2) Tahapan Perhutanan Sosial:
 - a) Pendampingan Tahapan Awal
 1. Apakah ada Sosialisasi tentang PS dan Ijin PS?
 2. Apakah memahami materi sosialisasi PS?
 3. Apakah pernah dilakukan inventarisasi potensi?
 4. Apakah pernah dilakukan identifikasi potensi Dampak Lingkungan dan Sosial?
 5. Apakah potensi hasil utama yang ada bisa dikembangkan?
 6. Apakah sejak awal sudah dibentuk KTH di kampung?
 7. Apakah dilibatkan perempuan dalam kepengurusan KTH?
 8. Apakah tahu luasan dan letak Hutan Kemasyarakatan yang diusulkan?

9. Apakah tahu siapa yang menanda-tangani Suran Permohonan Hutan Kemasyarakatan yang diketahui Kepala Kampung?
 10. Apakah tahu tentang Penetapan dan penerimaan SK pembentukan KTH?
 11. Apakah sudah ada AD/ART Kelompok KTH?
 12. Apakah sudah ada potensi unggulan yang akan dikembangkan di kampung?
 13. Apakah ada sosialisasi tentang Kelompok Usaha Perhutanan Sosial?
 14. Apakah dilibatkan perempuan dalam pengurusan KUPS?
 15. Apakah sudah ada komoditas utama yang akan dihasilkan?
 16. Apakah ada Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dari KTH-KUP
- b) Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan
1. Apakah sudah dilakukan penandaan batas lokasi ijin PS?
 2. Apakah sudah dilakukan pembuatan dan penandaan ruang/zonasi?
 3. Apakah sudah dilakukan Penyusunan RKPS dan RKT?
- c) Kerja sama dan akses permodalan dan akses pasar
1. Apakah ada kerjasama dengan para pihak selama ini?
 2. Apakah ada bantuan modal, peluang modal, Alat Ekonomi Produktif (AEP) selama ini?
 3. Apakah ada akses pasar dan jejaring usaha selama ini?
 4. Bagaimana dukungan keberlanjutan APBK, APBD, APBN, LSM, dan Para Pihak

d) Pengelolaan pengetahuan

1. Apakah ada pengelolaan pengetahuan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendokumentasian, publikasi media)?
2. Apakah ada fasilitasi pendampingan (pelatihan/ kursus/diklat) dari para pihak?
3. Apakah ada produk yang sudah dihasilkan selama ini?

e) Monitoring dan evaluasi

1. Apakah ada Monitoring dan Evaluasi bersama para pihak?
2. Apakah peran pendamping berjalan dengan baik di kampung?
3. Apakah perlu pendampingan rutin dan berkelanjutan serta monev bagi KTH-KUPS?

3) Strategi pengembangan KUPS

a) Pengembangan masyarakat

1. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan?
2. Apa strategi efektif untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis hutan yang berkelanjutan?
3. Bagaimana cara meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan pasar?

b) Pengelolaan Hutan

1. Bagaimana cara mengembangkan sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat?
2. Apa strategi efektif untuk mengurangi konflik antara kepentingan

ekonomi dan kepentingan lingkungan dalam pengelolaan hutan?

3. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan?

c) Kebijakan dan Regulasi

1. Bagaimana cara mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan Perhutanan Sosial?
2. Apa strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan?
3. Bagaimana cara mengintegrasikan prinsip-prinsip perhutanan sosial dalam kebijakan dan regulasi yang ada?

d) Monitoring dan Evaluasi

1. Bagaimana cara mengembangkan system monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan pengembangan Perhutanan Sosial?
2. Apa indicator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan Perhutanan Sosial?
3. Bagaimanan cara mengintegrasikan hasil monitoring dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan perhutanan sosial?

e) Kendala dan Akses Modal

1. Apa saja kendala yang bapa/ibu ketahui terkait pengelolaan Perhutanan Sosial dari aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekologi?
2. Apa saja sumber akses modal yang tersedia bagi masyarakat yang

terlibat dalam program perhutanan sosial?

3. Sejauh mana peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung akses modal untuk program perhutanan sosial?
4. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses modal untuk kegiatan perhutanan sosial, dan bagaimana cara mengatasinya?

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data ini bisa berasal dari jurnal, artikel ilmiah, buku, maupun instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki informasi pendukung untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Beberapa data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi peta lokasi, gambaran umum wilayah, salinan SK KTH, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket atau Kuesioner teknik pengumpulan data melibatkan pernyataan yang telah disusun secara sistematis. Responden akan diminta untuk mengisi tanggapan yang dapat diukur melalui opsi jawaban yang telah dibuat. Angket atau kuesioner juga digunakan untuk dari sampel yang skal besar dalam penelitian kuantitatif (Ardiansyah *et al.*, 2023)

2. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Peneliti akan interaksi langsung dengan narasumber yaitu anggota KUPS Madu KTH Mega Buana menanyakan pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.
3. Observasi merupakan salah satu teknik umum yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Secara sederhana, observasi berarti mengumpulkan informasi langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Mengumpulkan data tentang KUPS yaitu dimulai dengan pengamatan, lalu dilanjutkan dengan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena, baik yang terjadi secara alami maupun dalam situasi yang telah dirancang sebelumnya.

3.5. Analisis Data

1. Analisis Keberhasilan Tahapan Perhutann Sosial

Menurut (Warawarin et al., 2024), tahap evaluasi Program Perhutanan Sosial dengan mengidentifikasi fitur di tahap pelaksanaan. Dalam hal ini, keberlanjutan dianalogikan dengan keberhasilan pelaksanaan tahapan program perhutanan sosial melalui skema hutan kemasyarakatan setelah penetapannya. Keberhasilan yang mencakup 5 dimensi/tahapan yaitu yang pertama pendampingan tahap awal, kedua pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan, yang ketiga kerja sama, akses permodalan dan akses pasar, keempat pengelolaan pengetahuan, serta yang kelima monitoring dan evaluasi.

Untuk mengukur setiap tahapan, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang akan disampaikan melalui wawancara menggunakan kuesioner. Kuesioner ini berisi pernyataan dan pilihan jawaban, dan setiap tahapan akan dinilai berdasarkan

bagaimana pelaksanaannya di lapangan serta hasil pengamatan secara menyeluruh.

Setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala penilaian dari 1 sampai 5.

Tabel 2. Skor Kuesioner

| Skor | Keterangan |
|------|--|
| 5 | Sangat tahu/sangat setuju/sangat baik/sangat sering/sangat perlu |
| 4 | Tahu/setuju/baik/sering/perlu |
| 3 | Netral |
| 2 | Tidak tahu/tidak setuju/tidak baik/tidak sering/tidak perlu |
| 1 | Sangat tidak tahu/sangat tidak setuju/sangat tidak baik/sangat tidak sering/sangat tidak perlu |

Sumber: Wawarin et al., 2024

Kavanagh, P., & Pitcher, T. J. (2004) menyatakan bahwa Indeks keberhasilan program dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu:

Tabel 3. Indeks Keberhasilan Program

| Kategori | Keterangan |
|----------|---------------------------|
| 0-25 | Buruk atau tidak berhasil |
| 25,1-50 | Kurang berhasil |
| 50,1-75 | Cukup Berhasil |
| 75,1-100 | Baik atau sangat berhasil |

Sumber: Kavanagh et al., (2004)

2. Strategi Pengembangan (Swot)

Rumusan masalah yang kedua yaitu strategi pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana. Untuk mendapatkan strategi tersebut maka penelitian ini akan menggunakan analisis SWOT dalam menentukan strategi pengembangan KUPS.

SWOT yaitu *Stengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman). Dari hasil analisis SWOT kita dapat menemukan strategi yang tepat dalam mengembangkan KUPS Madu KTH Mega Buana. SWOT adalah alat perencanaan dan manajemen strategis yang mengorganisir faktor internal dan eksternal ke dalam matriks untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan perumusan strategi (Jannah, M., *et al.*, 2024).

a. *Stengths* (Kekuatan)

Faktor internal yang menjadi keunggulan KUPS Madu KTH Mega Buana seperti keterampilan, reputasi, dan sumber daya manusia yang memberikan nilai lebih dalam pengelolaan program Perhutanan Sosial.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Faktor internal pada KUPS Madu KTH Mega Buana yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, seperti keterbatasan kompetensi, sumber daya yang terbatas, dan proses yang kurang efisien.

c. *Opportunities* (Peluang)

Faktor eksternal yaitu faktor peluang dari luar KUPS Madu KTH Mega Buana berupa kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan, seperti tren pasar, perubahan regulasi, teknologi baru

d. *Threats* (Ancaman)

Faktor eksternal yaitu faktor ancaman dari luar KUPS Madu KTH Mega Buana yang dapat mengancam kinerja seperti peningkatan persaingan, perubahan regulasi, dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

Tabel 4. Tabel SWOT

| <i>Internal Eksternal</i> | <i>Stregths: Kekuatan</i> | <i>Weaknesses: Kelemahan</i> |
|-------------------------------|--|--|
| <i>Oportunities: Peluang</i> | Strategi SO: (<i>Streths-Oportunities</i>) Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. | Strategi WO: (<i>Weaknesses-Oportunities</i>) Gunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. |
| <i>Theats: Ancaman</i> | Strategi ST: (<i>Stregths-Theats</i>) Minimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. | Strategi WT: (<i>Weaknesses-Theats</i>) Minimalkan kelemahan dan hindari ancaman. |

Sumber: Bennis, B. et al., (2024)



IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Luas Wilayah

Desa Paccekke berada di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terdiri dari dua dusun yang tersebar di area yang sebagian besar berupa dataran tinggi dan lahan pertanian. Luas wilayahnya kurang lebih 24,55 km². Desa Paccekke memiliki batas wilayah yang sudah ditentukan secara jelas. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Desa Batu Alang, di timur berbatasan dengan Desa Padang Loang, di barat berbatasan dengan Desa Labokong, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tompo Bulu.

Desa Paccekke terletak di daerah dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 650 meter di atas permukaan laut. Karena berada di dataran tinggi, wilayah ini sangat cocok untuk budidaya tanaman pangan. Meskipun begitu, curah hujan di Desa Paccekke cukup tinggi, yang justru menjadi keunggulan karena menjamin ketersediaan air bersih dan air irigasi sepanjang tahun. Namun, sistem irigasi yang digunakan masih bersifat tradisional, sehingga saat musim kemarau, air kadang tidak mencukupi untuk sawah dan kebun warga. Secara administratif, Desa Paccekke terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Paccekke dan Dusun Kading. Kantor pemerintahan desa berada di Dusun Paccekke, sementara Dusun Kading berjarak sekitar 5 kilometer dari pusat desa. Kondisi jalan menuju Dusun Kading menanjak dan menurun, sebagian besar jalan masih berupa jalan cor yang belum diperbaiki.

4.2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Desa Paccekke dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya air, karena di setiap dusunnya terdapat mata air dan aliran sungai. Warga desa memanfaatkan sumber daya alam ini untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengairan lahan pertanian. Air untuk sawah umumnya berasal dari mata air dan sungai yang berada di sekitar area pertanian. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah kurangnya fasilitas irigasi, sehingga pada waktu tertentu sawah masih mengalami kekurangan air.

Mayoritas penduduk Desa Paccekke bekerja sebagai petani. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, sekitar 90% warga berprofesi sebagai petani, 8% sebagai wirausaha, dan 2% merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian besar petani di desa ini menggarap sawah, berkebun kemiri, menanam kacang dan suweg, serta beternak. Selain itu, ada pula warga yang berdagang hasil pertanian, baik secara eceran di pasar lokal maupun berdagang antar kabupaten hingga ke luar provinsi (Busmah N.A et al., 2024). Tidak sedikit juga warga yang bekerja di sektor pemerintahan atau menjadi tenaga pengajar. Menariknya, sebagian masyarakat memiliki pekerjaan ganda; misalnya ada yang menjadi petani sekaligus beternak sapi, atau bekerja sebagai aparat pemerintahan namun tetap menjalankan usaha pertanian di waktu luang.

4.3. Kondisi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana

Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana adalah kelompok tani yang dibentuk di Desa Paccekke, Kecamatan Soppeng Riaja. KTH ini dibentuk dari tahun 2021 yang diketuai oleh Bapak Nanda. Jumlah anggota dari KTH Mega

Buana sebanyak 30 orang, tidak semua anggota KTH memiliki lahan di kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dikelola. Kawasan hutan yang diberikan kepada KTH Mega Buana untuk dikelola yaitu sebesar 150 ha, dengan dominan tumbuhan pohon kemiri di dalam kawasan tersebut.

4.4. Kondisi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Madu yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana merupakan KUPS Madu yang diketuai oleh bapak Basineng. KUPS ini beranggotakan 17 orang dimana 2 orang anggota dari KUPS telah pindah keluar daerah (merantau). Jadi sisa anggota dari KUPS Madu KTH Mega Buana adalah 15 orang. KUPS ini dibentuk pada tanggal 27 Januari 2021, dengan usaha yang dikembangkan oleh KUPS yaitu madu Hutan (Lebah *Apis dorsata*, *Apis cerana*, *Apis florea*), dan madu Meliponini (Lebah *Trigona*) berikut merupakan struktur organisasi dari KUPS Madu KTH Mega Buana:

Tabel 5. Struktur Organisasi KUPS Madu KTH Mega Buana

| No | Jabatan | Nama |
|-----|------------|---------|
| 1. | Ketua | Bsnng |
| 2. | Sekretaris | Tr |
| 3. | Bendahara | Abd. Rf |
| 4. | Anggota | Sngg Sm |
| 5. | | Cmb hng |
| 6. | | Hsddn |
| 7. | | Sr |
| 8. | | Bkr |
| 9. | | Bhr Sn |
| 10. | | Mnsyr |
| 11. | | Sr Z |
| 12. | | Mnddn |
| 13. | | Tm Hsn |
| 14. | | Nnd |
| 15. | | Bsr |

Sumber: Ketua KUPS Madu KTH Mega Buana (2025)

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Responden

a. Tingkatan Umur

Tingkat umur pada seseorang memengaruhi kehidupan seseorang sehari-hari, baik dalam beraktifitas maupun dalam bekerja. Terutama pada masyarakat yang bekerja dilapangan seperti petani. Umur dapat mempengaruhi fisik, psikologi, pengetahuan, pengambilan keputusan dalam bertani. Berikut tingkatan umur responden pada penelitian kali ini:

Tabel 6. Tingkatan Umur Responden

| Umur (Tahun) | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|--------------|------------------|----------------|
| <15 | 0 | 0 |
| 15-64 | 14 | 93,33 |
| >64 | 1 | 6,67 |
| Total | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5, dapat kita lihat bahwa tidak ada responden yang berusia <15 tahun dalam artian usia belum produktif, 6,67% usia responden tidak produktif, dan 93,33% usia produktif yaitu 15 – 64 tahun. Karena usia 15-64 tahun lebih muda dan aktif secara fisik, kelompok umur ini memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Menurut Pusat Statistik Nasional (2018), kelompok penduduk berusia <15 tahun dianggap belum produktif secara ekonomis, kelompok 15 – 65 tahun dianggap produktif, dan kelompok umur 60 tahun ke atas dianggap tidak produktif lagi. Ini menunjukkan bahwa anggota KUPS Madu KTH Mega Buana masih termasuk dalam umur produktif karena mereka masih dapat memenuhi

penghidupannya. Jika umur masyarakat sudah tidak produktif lagi, maka akan ada penurunan fisik dan produktivitas dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, umur yang masih produktif akan sangat mempengaruhi kekuatan fisik seseorang.

b. Tingkatan Pendidikan

Pendidikan pada umumnya memengaruhi cara anggota berpikir tentang KUPS dan cara mereka mempromosikan hasil usaha KUPS serta hasil bertani mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin bijak petani dalam menggunakan informasi baru untuk meningkatkan produktivitas. Pendidikan memengaruhi cara orang berpikir, menerima, dan mencoba sesuatu yang baru. Berikut tingkatan pendidikan responden:

Tabel 7. Tingkatan Pendidikan Responden

| Tingkatan Pendidikan | Jumlah Responden | Persentasi (%) |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tidak Sekolah | 3 | 20 |
| SD | 9 | 60 |
| SMP | 2 | 13,33 |
| SMA/S1/S2 | 1 | 6,67 |
| Total | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa anggota KUPS Madu KTH Mega Buana dengan nilai persentase tertinggi dalam pendidikan, dengan tamatan SD 60%, tidak sekolah 20%, SMP 13,33%, dan SMA/S1/S2 6.67,5%. Sebagian besar, responden tidak melanjutkan pendidikan karena kurangnya keuangan/ekonomi dan minat yang lebih besar untuk bekerja daripada sekolah. Dengan demikian tingkat pendidikan pada KUPS Madu KTH Mega Buana rendah namun dapat diimbangi

oleh 1 anggota yang merupakan lulusan S2. Hal tersebut dapat mempengaruhi cara berpikir, menerima, dan mencoba sesuatu yang baru.

c. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga terdiri dari tanggungan yang dibiayai oleh kepala keluarga. Jumlah tanggungan mempengaruhi kondisi perekonomian, karena banyaknya tanggungan akan mempengaruhi biaya hidup, anak menjadi harapan keluarga agar tidak miskin, dan tanggung jawab yang lebih besar dapat mempengaruhi motivasi dan giat dalam bekerja.

Tabel 8. Tanggungan Keluarga

| Tanggungan Keluarga | Jumlah(Responden) | Persentase (%) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1-3 | 5 | 33,33 |
| 4-6 | 10 | 66,67 |
| >6 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 7, dapat kita lihat bahwa sebanyak 5 orang responden memiliki tanggungan dari 1-3 orang dengan presentase 33,33%, dan sebanyak 10 orang responden memiliki tanggungan dari 4-6 orang dengan presentase 66,67%, sedangkan responden yang memiliki tanggungan diatas 6 orang tidak ada. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi tenaga kerja yang terlibat dalam mengelola hutan dan KUPS. Namun, menyelesaikan pekerjaan tersebut akan lebih mudah jika banyak anggota keluarga bekerja. Banyaknya tanggungan dalam keluarga akan memengaruhi berapa banyak biaya konsumsi yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari.

d. Kepemilikan Lahan

Kepemilikan lahan yang dimaksud adalah SK Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 1/L.13.P/P2T/11/2016 Memutuskan Menetapkan KETIGA: Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) sebagai mana dimaksud diktum KESATU, bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan hutan dan dilarang dipindahtangankan, digunakan atau digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan yang telah disahkan , serta dilarang merubah status dan fungsi Kawasan hutan. Anggota dari KUPS Madu semuanya tergabung dalam skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Mega Buana. Luas lahan garapan HKm yaitu 150 Ha dengan kualitas tanah masih termasuk kategori subur karena vegetasi pada lahan kawasan HKm masih beragam namun didominasi oleh pohon kemiri. Serta lahan pada kawasan HKm merupakan bukit dengan kemiringan 25⁰ dan sebagian juga dataran rendah. Berikut luas lahan responden:

Tabel 9. Kondisis Lahan Responden

| Kategori (Ha) | Jumlah Responden | Persentase (%) |
|----------------------|------------------|----------------|
| Tidak memiliki lahan | 2 | 13,33 |
| 1-4 | 13 | 86,67 |
| 5-8 | 0 | 0 |
| Jumlah | 15 | 100 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8, dapat kita lihat bahwa sebanyak 2 orang responden masuk kategori tdak memiliki lahan di HKm dengan persentase 13,33%, dan sebanyak 13 orang responden masuk kategori luas lahan 1-4 Ha dengan presentase 86,67%, sedangkan jumlah responden yang masuk kategori luas lahan 5-8 Ha tidak ada responden. Pada umumnya luas lahan mempengaruhi jumlah produksi Hasil

Hutan Bukan Kayu (HHBK). Namun tergantung lagi pada pengolahan lahan sebagian lahannya. Pada KTH Mega Buana mereka tidak mengoptimalkan semua lahannya dikarenakan faktor modal yang cukup besar.

5.2. Analisis Keberhasilan Program Perhutann Sosial

Pada analisis keberhasilan program Perhutanan Sosial ada 5 tahapan yang akan diukur dengan skor 1-5. Hasil dari perhitungan dari 5 tahapan Perhutanan Sosial untuk menghasilkan persentase Indeks Keberhasilan Program maka

Jumlah Skor yang dihasilkan dari wawancara kuesioner X100 :
Total Skor

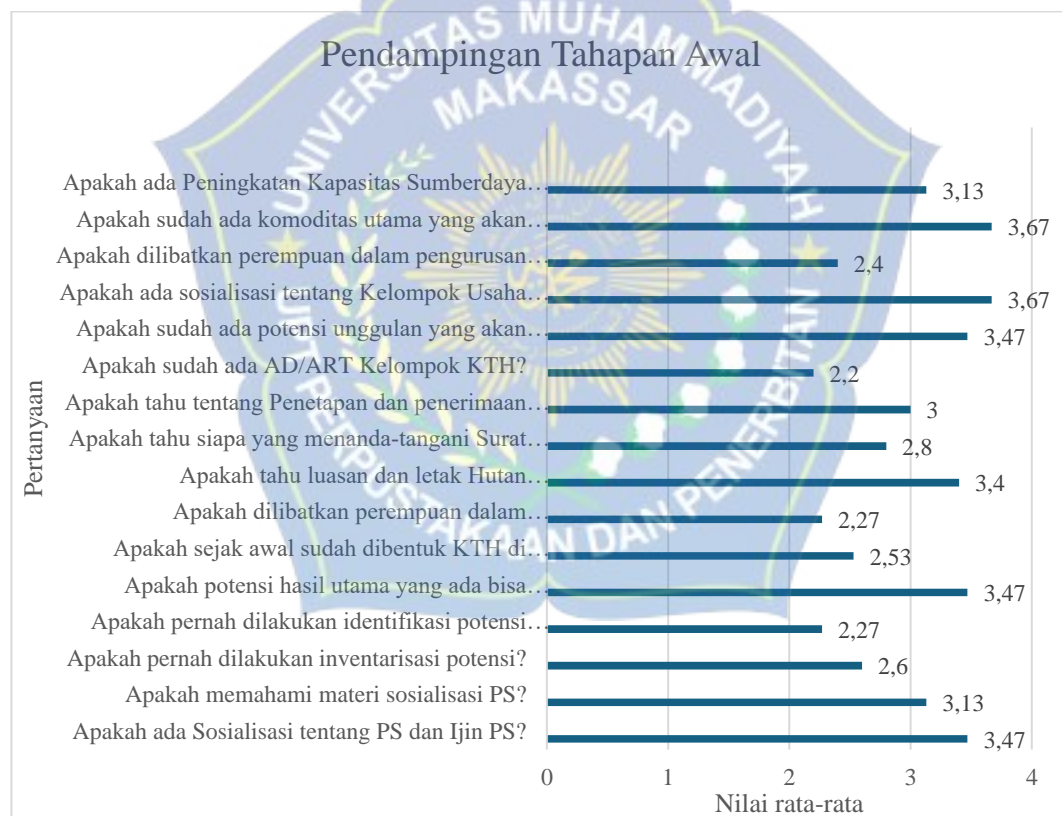
Tabel 10. Analisis Keberhasilan Program Perhutanan Sosial

| Tahapan Perhutanan Sosial | Total Skor | Skor yang Dihasilkan | Persentase (%) |
|---|--------------|----------------------|----------------|
| Pendampingan tahap awal | 1.200 | 712 | 59,33 |
| Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan | 225 | 132 | 58,67 |
| Kerjasama dan akses permodalan dan akses pasar | 300 | 178 | 59,33 |
| Pengelolaan pengetahuan | 225 | 145 | 64,44 |
| Monitoring dan evaluasi | 225 | 167 | 74,22 |
| Total | 2.175 | 1.354 | 62,8 |

Sumber: Data Primer Setelah Diolah (2025)

Dari total nilai sempurna sebesar 2.175 poin pada seluruh tahapan perhutanan sosial, yang berhasil dicapai adalah 1.354 poin, atau sekitar 62,8%. Tahapan yang

paling baik pencapaiannya adalah monitoring dan evaluasi, yaitu 74,22%. Disusul oleh pengelolaan pengetahuan dengan nilai 64,44%. Sementara itu, tahap dengan capaian paling rendah adalah pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan, yang hanya mencapai 58,67%. Dua tahap lainnya, yaitu pendampingan awal dan kerja sama serta akses permodalan/pasar, sama-sama berada di angka 59,33%. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun sudah cukup baik, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama di tahap awal pendampingan dan dukungan akses ekonomi bagi masyarakat.



Gambar 2. Diagram Batang Pendampingan Tahapan Awal

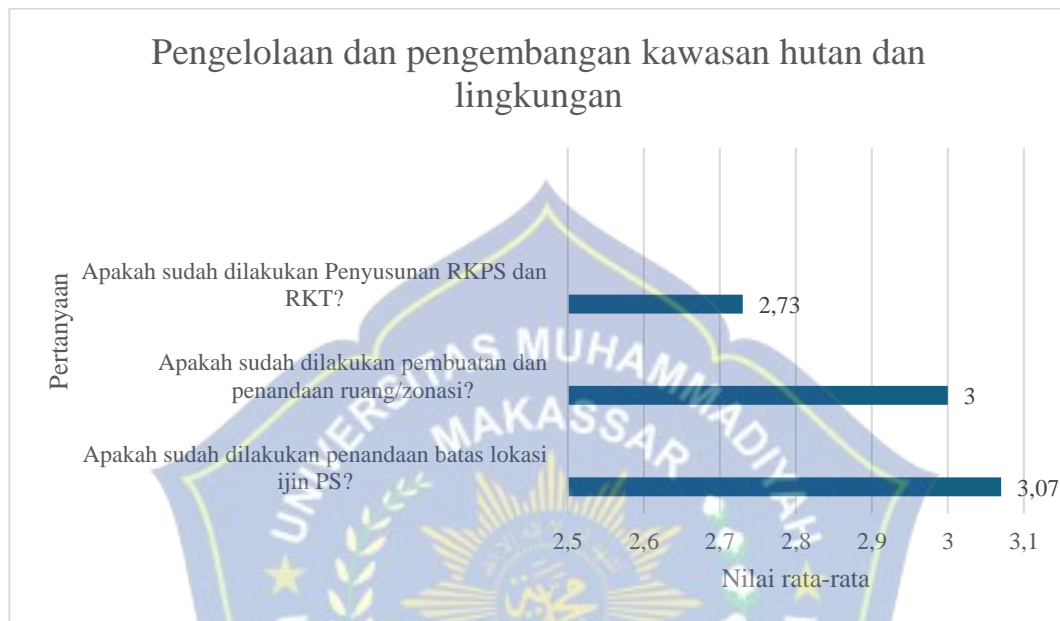
Gambar 2, diagram batang Tahapan Awal menampilkan hasil rata-rata penilaian responden terhadap 16 pertanyaan yang mencerminkan tingkat

pemahaman dan keterlibatan mereka dalam tahapan awal program Perhutanan Sosial. Secara keseluruhan, mayoritas responden memberikan nilai yang relatif tinggi terhadap indikator-indikator berkaitan dengan arah dan rencana pengembangan. Terutama pada aspek komoditas utama yang akan dikembangkan serta sosialisasi tentang Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang masing-masing memperoleh skor 3,67. Aspek lain yang juga mendapatkan skor tinggi adalah potensi unggulan, potensi hasil utama, serta sosialisasi terkait Perhutanan Sosial dan perizinannya, yang masing-masing meraih skor 3,47. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memperoleh informasi yang cukup baik mengenai arahan program dan peluang yang tersedia.

Namun, temuan ini juga menunjukkan beberapa kelemahan yang signifikan. Beberapa aspek memperoleh skor di bawah 2,7, seperti keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kelompok (2,4), proses inventarisasi potensi (2,27), identifikasi potensi (2,27), serta keberadaan AD/ART kelompok KTH (2,2). Ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam pelibatan gender serta kelemahan dalam aspek administrasi dan pencatatan potensi sumber daya. Selain itu, aspek pemahaman tentang materi sosialisasi Perhutanan Sosial (2,6) dan pengetahuan mengenai pihak yang menandatangani surat keputusan (2,8) juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap proses administratif masih belum merata.

Secara keseluruhan, hasil penilaian ini menunjukkan bahwa tahap awal program telah dilaksanakan dengan baik dalam aspek perencanaan dan sosialisasi. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, perlu ada penguatan dalam pelibatan kelompok rentan, seperti perempuan, penyusunan

dokumen kelembagaan, serta identifikasi dan inventarisasi potensi yang lebih menyeluruh. Ini penting agar Perhutanan Sosial tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga bersifat partisipatif dan inklusif.



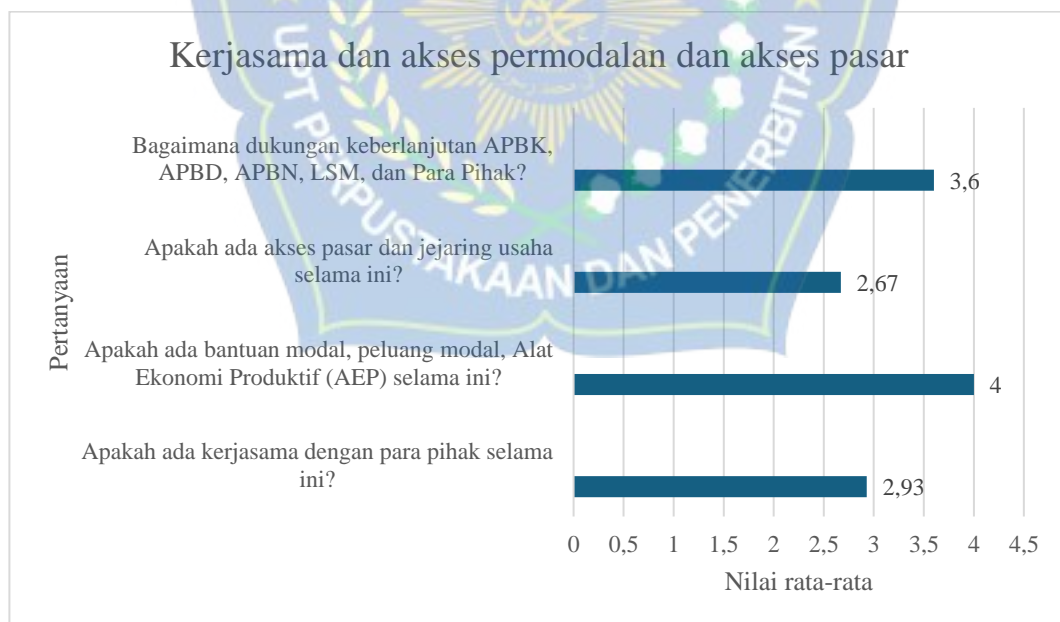
Gambar 3. Digram Batang Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan dan Lingkungan

Gambar 3, diagram batang menunjukkan hasil penilaian rata-rata dari para responden terhadap tiga pertanyaan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan serta lingkungan dalam program Perhutanan Sosial. Secara umum, nilai rata-rata menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan ini berada dalam kategori sedang hingga baik.

Pertanyaan tentang penandaan batas lokasi izin Perhutanan Sosial mendapat nilai tertinggi, yaitu 3,07, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok sudah mampu mengidentifikasi batas wilayah dengan cukup baik. Selanjutnya, kegiatan membuat dan menandai ruang atau zonasi mendapat skor 3, artinya

kegiatan zonasi sudah mulai dilakukan, meskipun belum dilakukan secara menyeluruh. Sementara itu, pertanyaan terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mendapat nilai rata-rata terendah, yaitu 2,73. Nilai ini menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan teknis masih kurang memadai dan perlu mendapat perhatian yang lebih.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun aspek penandaan lokasi dan zonasi sudah cukup berjalan, tetapi masih diperlukan peningkatan kemampuan dan bimbingan dalam penyusunan dokumen perencanaan, agar pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan bisa lebih terarah, melibatkan masyarakat, dan berkelanjutan.

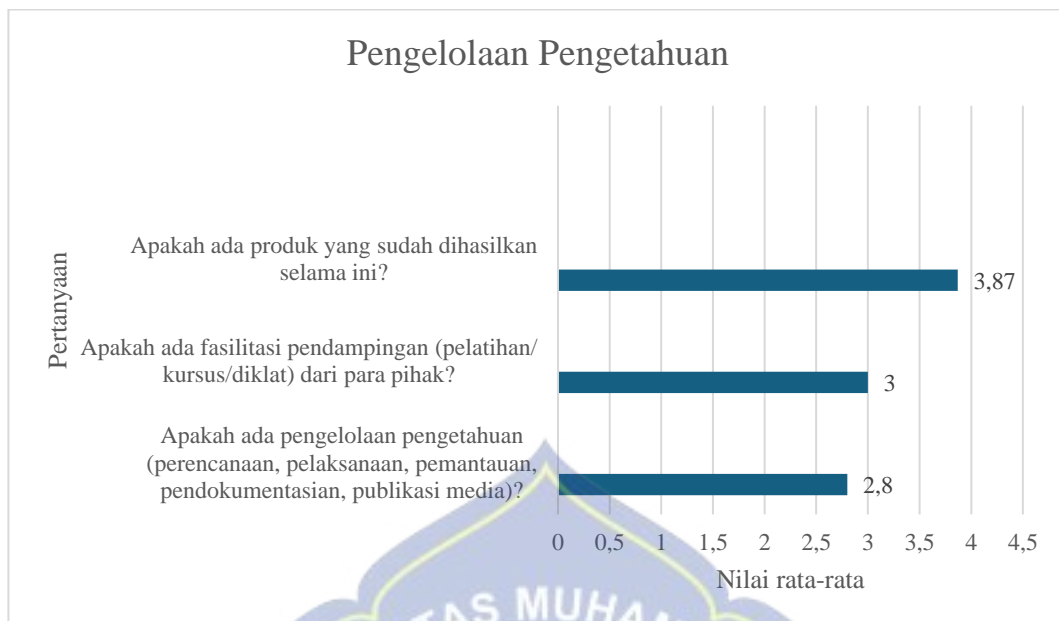


Gambar 4. Diagram Batang Kerjasama dan Akses Permodalan dan Akses Pasar

Gambar 4, diagram batang menunjukkan bagaimana responden memandang aspek kerja sama, akses modal, dan akses pasar dalam menjalankan program

Perhutanan Sosial. Secara keseluruhan, hasil penilaian menunjukkan perbedaan tingkat pencapaian, mulai dari yang sangat baik hingga cukup rendah. Pertanyaan terkait bantuan modal, peluang modal, dan dukungan Alat Ekonomi Produktif (AEP) mendapat skor tertinggi, yaitu 4, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendapat dukungan alat pengolahan serta bahan seperti bee net atau topi pelindung wajah, bibit lebah Trigona, stup dan lain-lain. Sementara itu, dukungan dari pemerintah dan pihak lain seperti APBK, APBD, APBN, LSM, dan mitra juga dinilai cukup baik dengan skor rata-rata 3,6. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga sudah cukup baik dalam mendukung program tersebut namun belum maksimal.

Sebaliknya, akses pasar dan jaringan usaha mendapat skor terendah yaitu 2,67, yang menunjukkan masih ada kesulitan dalam menjual produk dari hutan dan memperluas kerja sama bisnis. Di sisi lain, kerja sama dengan berbagai pihak mendapat skor 2,93, artinya ada bentuk kolaborasi, tetapi belum cukup baik. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa bantuan dana lebih mudah didapatkan dibandingkan akses pasar dan jaringan, yang tetap menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha KUPS Madu KTH Mega Buana.

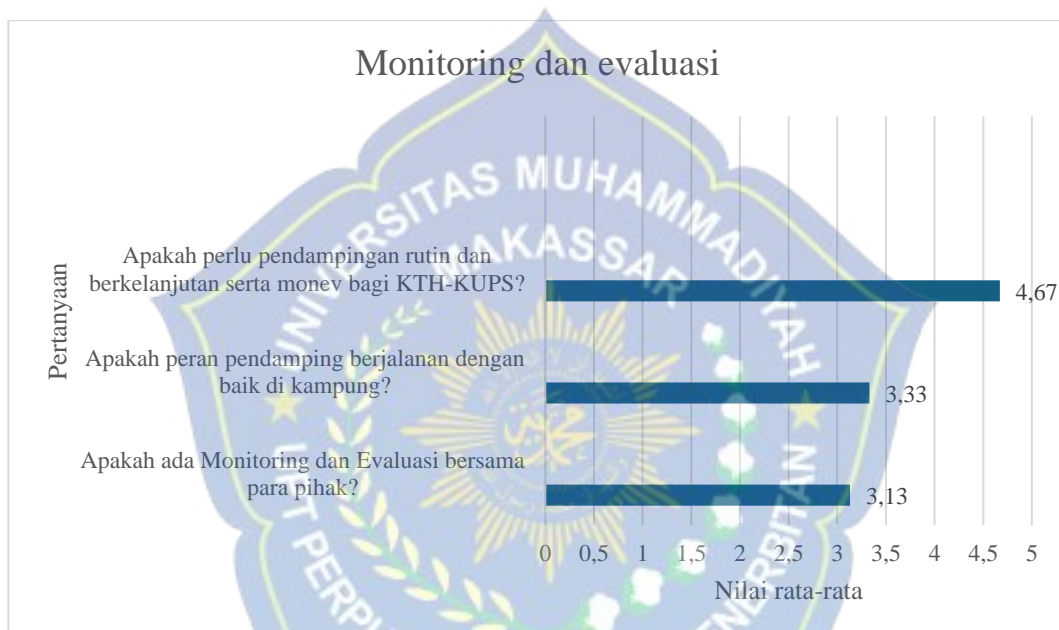


Gambar 5. Diagram Batang Pengelolaan Pengetahuan

Gambar 5, diagram batang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam aspek pengelolaan pengetahuan pada program Perhutanan Sosial, berdasarkan hasil penilaian dari para responden. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanyaan mengenai produk yang sudah dihasilkan mendapat skor tertinggi yaitu 3,87. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah mampu menghasilkan produk nyata sebagai hasil dari program yang dijalankan. Ini menjadi tanda positif bahwa ada hasil yang konkret dari proses pengelolaan dan pemberdayaan. Selanjutnya, terkait fasilitasi pendampingan berupa pelatihan, kursus, atau diklat, mendapatkan skor 3. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dari berbagai pihak sudah tersedia cukup namun belum maksimal, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan dari pelatihan tersebut.

Sementara itu, aspek pengelolaan pengetahuan secara menyeluruh, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendokumentasian, dan

publikasi informasi, mendapat skor terendah yaitu 2,8. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasil produk dan pelatihan sudah dilakukan, sistem untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi masih belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, memperkuat manajemen pengetahuan secara menyeluruh sangat penting agar hasil kegiatan tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga terdokumentasi dengan baik dan bisa diulang di tempat lain.

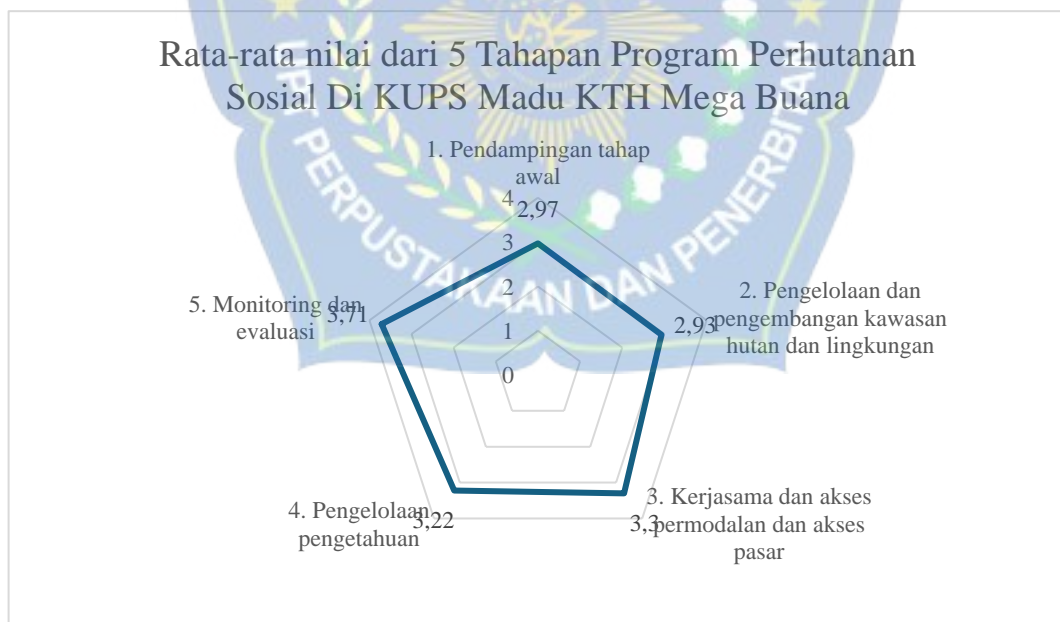


Gambar 6. Diagram Batang Monitoring dan Evaluasi

Gambar 6, diagram batang menunjukkan hasil penilaian terhadap aspek monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Pertanyaan mengenai kebutuhan akan pendampingan yang berkelanjutan dan rutin serta monitoring dan evaluasi (monev) bagi KUPS Madu KTH Mega Buana mendapatkan skor tertinggi, yaitu 4,67. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa bahwa pendampingan dan monev yang berkelanjutan diperlukan agar program tetap berjalan efektif dan bermanfaat di lapangan. Sementara itu,

peran pendamping di kampung mendapat skor 3,33, yang menunjukkan bahwa meskipun kehadiran pendamping sudah cukup dirasakan, masih ada ruang untuk meningkatkan efektivitas peran mereka dalam masyarakat.

Pertanyaan mengenai pengawasan dan penilaian bersama para pihak mendapatkan skor terendah yaitu 3,13. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam proses penilaian belum cukup baik, dan diperlukan partisipasi lebih banyak pihak agar pengawasan dan evaluasi program dapat berjalan secara menyeluruh dan adil. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya menerapkan sistem pendampingan yang berkelanjutan dan melibatkan banyak pihak agar evaluasi program dapat dilakukan secara konsisten dan program tersebut dapat berkembang lebih baik.



Gambar 7, Diagram Radar Tahapan Perhutanan Sosial

Gambar 7, diagram radar menunjukkan nilai rata-rata dari lima tahapan Program Perhutanan Sosial di KUPS Madu KTH Mega Buana. Secara keseluruhan, kelima aspek tersebut memiliki nilai antara 2,93 hingga 3,71, yang menggambarkan capaian yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Tahap monitoring dan evaluasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,37, menunjukkan bahwa aspek ini sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sempurna. Sementara itu, pengelolaan pengetahuan dan pengelolaan serta pengembangan kawasan hutan dan lingkungan masing-masing mendapat skor 3,22 dan 2,93, yang artinya kegiatan tersebut sudah dilakukan, namun kualitas dan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, kerjasama dan akses permodalan dan akses pasar mendapatkan nilai 3,3, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini mulai berjalan, tetapi belum terstruktur secara rutin dan belum melibatkan semua pihak. Aspek dengan nilai terendah adalah pendampingan tahapan awal, dengan skor 2,97, yang menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kurangnya inventarisasi potensi, melibatkan perempuan dalam pengelolaan dan tidak adanya AD/ART yang bisa menghambat keberlanjutan program di masa depan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bahwa program sudah berjalan di semua tahapan, namun masih membutuhkan perbaikan dan penguatan terutama di bidang pendampingan tahapan awal dan pengelolaan serta pengembangan kawasan hutan dan lingkungan.

5.3. Strategi Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Madu Kelompok Tani Hutan (KTH) Mega Buana

Strategi pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana menggunakan analisis SWOT *Stengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman). Observasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari KUPS Madu, dari hasil analisis SWOT kita dapat menemukan strategi yang tepat dalam mengembangkan KUPS Madu KTH Mega Buana dapat kita dilihat pada table 11:

a. Kekuatan (*Stregths*)

1. Dukungan kelembagaan dari KTH Mega buana

KTH Mega Buana telah memainkan peran penting dalam membantu pengembangan KUPS Madu. Proses produksi dan distribusi madu dapat berjalan lebih terorganisir dengan adanya struktur kelembagaan yang aktif dan solid. Dengan bantuan ini, anggota kelompok dapat bekerja sama dengan lebih baik.

2. Adanya sumberdaya alam yang mendukung keberlangsungan produksi madu

Lebah mendapatkan pakan alami dari lingkungan sekitar Desa Paccekke yang masih terjaga dan kaya akan vegetasi. Tanaman berbunga yang melimpah dan masih dikelilingi oleh pegunungan sangat membantu dalam menjaga keberlanjutan produksi madu. Ini pasti menjadi keunggulan tersendiri karena ekosistem untuk budidaya lebah madu tidak tersedia di semua tempat.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Produksi madu masih terbatas dan tidak konsisten

Salah satu masalah utama adalah jumlah produksi madu yang belum stabil dan masih tergolong rendah. Faktor-faktor seperti cuaca, musim berbunga, dan keterbatasan teknologi budidaya seringkali mengubah hasil panen madu, sehingga sulit untuk memenuhi permintaan pasar secara konsisten.

2. Kurang dalam pengemasan dan pelabelan produk

Produk madu kurang bersaing di pasar karena kemasan dan labelannya yang sederhana. Namun, tampilan kemasan sangat penting untuk menarik pembeli, terutama di pasar kontemporer.

3. Pemasaran hanya di lingkup lokal

Akses dan promosi yang terbatas menyebabkan pasar yang lebih luas, seperti pasar digital atau antar daerah, belum sepenuhnya dieksplorasi. Tidak diragukan lagi, hal ini menghambat pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

c. Peluang (*Oportunities*)

1. Dukungan dari pemerintah dan NGO dalam bentuk pelatihan dan bantuan alat, modal

Adanya perhatian dari pemerintah maupun NGO menjadi peluang besar untuk meningkatkan kapasitas usaha. Program pelatihan, bantuan alat produksi, serta dukungan modal bisa mempercepat pengembangan kualitas dan kuantitas produksi, sekaligus membuka akses ke jejaring pasar yang lebih luas.

2. Peluang ke pasar digital

Madu lokal memiliki peluang besar untuk masuk ke pasar digital karena perkembangan teknologi dan tren belanja online. Dengan didukung oleh strategi pemasaran yang tepat, produk ini dapat menarik pelanggan dari berbagai wilayah, bahkan dari luar negeri, melalui media sosial.

d. Ancaman (*Theast*)

1. Persaingan produk madu dari luar

Madu lokal kini harus bersaing dengan berbagai produk dari luar daerah bahkan luar negeri yang menawarkan harga atau kemasan lebih menarik. Jika tidak ditingkatkan, kualitas dan nilai jual madu lokal bisa kalah bersaing di mata konsumen

2. Perubahan iklim

Cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim sangat mempengaruhi siklus berbunga tanaman dan perilaku lebah. Hal ini berdampak langsung terhadap keberhasilan panen madu dan bisa menyebabkan penurunan produksi secara drastis

3. Hama dan penyakit pada lebah

Ancaman lain yang cukup serius adalah serangan hama dan penyakit yang bisa menyerang koloni lebah. Jika tidak ditangani dengan cepat, hal ini dapat menyebabkan kematian lebah dalam jumlah besar, sehingga mengganggu proses produksi madu.

| | | |
|---|--|--|
| <div style="text-align: center;"> <p><i>Internal</i></p> <p><i>Eksternal</i></p> </div> | <p>Streghths:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kelembagaan dari KTH Mega Buana 2. Adanya sumberdaya alam yang mendukung keberlangsungan produksi madu | <p>Weaknesses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi madu masih terbatas dan tidak konsisten 2. Kurang dalam pengemasan dan pelabelan prodk 3. Pemasaran hanya di lingkup lokal |
| | <p>Oportunities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari pemerintah dan NGO daam bentuk pelatihan dan bantuan alat, modal. 2. Peluang ke pasar digital | <p>SO:</p> <p>Mengembangkan produk madu khas lokal dengan kualitas tinggi untuk menjangkau pasar digital.</p> <p>WO:</p> <p>Mengakses bantuan permodalan untuk peningkatan sarana produksi dan pengemasan.</p> |
| | <p>Theats:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan produk madu dari luar 2. Perubahan iklim 3. Hama dan penyakit pada lebah | <p>ST:</p> <p>Diversifikasi produk olahan madu (misal: madu herbal, lilin lebah, propolis) untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas utama.</p> <p>WT:</p> <p>Menjalin kerja sama dengan lembaga riset atau universitas untuk pengembangan teknologi budidaya lebah.</p> |

Strategi pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana sebaiknya fokus pada peningkatan potensi dari dalam kelompok dan penggunaan peluang dari luar. Karena memiliki madu lokal yang berkualitas tinggi, kelompok ini bisa memperluas pasar dengan memanfaatkan platform digital, sehingga produknya dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Di sisi lain, akses ke dana modal sangat penting untuk meningkatkan fasilitas produksi, terutama dalam hal pengemasan agar lebih menarik dan kompetitif. Untuk menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan persaingan pasar, kelompok bisa mengembangkan berbagai produk berbasis madu,

seperti madu herbal, lilin lebah, atau propolis, sebagai alternatif agar usaha tidak hanya bergantung pada satu jenis produk saja. Selain itu, bekerja sama dengan lembaga riset atau universitas dapat membantu dalam pengembangan teknologi budidaya lebah yang lebih efektif dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan strategi tersebut, diharapkan usaha madu lokal bisa berkembang secara berkelanjutan.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan:

1. Program Perhutanan Sosial di KUPS Madu KTH Mega Buana cukup berhasil dengan indeks keberhasilan mencapai 62,8%.
2. Strategi yang tepat dalam pengembangan KUPS madu KTH Mega Buana yaitu:
 - a. Mengembangkan produk madu khas lokal dengan kualitas tinggi untuk menjangkau pasar digital.
 - b. Mengakses bantuan permodalan untuk peningkatan sarana produksi dan pengemasan.
 - c. Diversifikasi produk olahan madu (misal: madu herbal, lilin lebah, propolis) untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu komoditas utama.
 - d. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga riset atau universitas untuk pengembangan teknologi budidaya lebah.

6.2. Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan program Perhutanan Sosial, pendampingan awal dan pengelolaan kawasan hutan perlu lebih diperkuat, baik dari sisi teknis maupun pemberdayaan masyarakat. KUPS Madu juga sebaiknya mulai fokus pada peningkatan kualitas kemasan dan pemasaran agar produknya bisa bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk secara digital. Pemanfaatan pelatihan dan bantuan dari pemerintah atau NGO harus dimaksimalkan sebagai bekal peningkatan kapasitas kelompok. Selain itu, membangun kerja sama dengan

perguruan tinggi atau lembaga riset bisa membuka peluang pengembangan teknologi budidaya lebah yang lebih modern dan tahan terhadap perubahan iklim.



DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita and Jailani, M.S. (2023) 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), pp. 1–9.
- Azhar, L.T. (2021) 'Evaluasi Program Perhutanan Sosial di Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali'.
- Badan Pusat Statistik. (2018) umlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table>.
- Bakri, S. *et al.* (2024) 'Are the Physical and Social Capitals Still Critical Factors in Enhancing the Sluggish Productivity of Coffee Agroforestry?: The Evidence of Endogenous Growth Role at Batutegi Forest Management Unit', *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 30(2), pp. 284–294.
- Busmah N.a *et al.*, (2024) Kabupaten Barru Dalam Angka Barru *Regency in Figures 2024*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru, ISSN 0215-6547.
- Bennis, B. *et al.*, (2024). *Strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis of hemodialysis electronic health record implementation*. *Cureus*, 16(2).
- Faizal, A.N., Ilham, M. and Sunan, N. (2023) 'Implementasi Tahapan Pengembangan Masyarakat Dalam Program Perhutanan Sosial', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1).
- Hadju, V.A. and Aulia, U. (2022) *Desain Penelitian Mixed Method*.
- Hidayat, F.R. and Trison, S. (2024) 'Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di KPH Bandung Selatan', *IPB University [Disertasi]*.
- Jamika, F.I. *et al.* (2023) 'Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Indonesia', *Jurnal Pro-Life*, 10(2), pp. 853–863.
- Jannah, M., *et al.*, (2024). Pentingnya Analisis Swot dalam Suatu Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, 2(2), 9-17.
- Kavanagh, P., & Pitcher, T. J. (2004). *Implementing Microsoft Excel software for rapfish: A technique for the rapid appraisal of fisheries status*. *Fisheries Centre Research Reports, Vancouver*.
- Lawasi, M.A. (2022) 'Dinamika Akses Petani terhadap Teknologi, Pasar, dan Modal dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Nambo Lempek Kabupaten Banggai', *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(1980), pp. 1349–1358.

- Pambudi, A.S. (2023) 'Capaian, Tantangan Implementasi, Dan Rekomendasi Kebijakan Perhutanan Sosial Di Indonesia Andi', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), pp. 74–94.
- PermenLHK (2021) 'Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Ministerial Decree on the Social Forestry Management) P.09/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2021', *Ministry of Environment and Forestry - Republic of Indonesia*, pp. 1–268.
- Rahmat, A.F. (2024) Kelayakan Usaha Lebah Madu Trigona Di Kups Madu Kth Mega Buana Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Rusadi, N. (2021). Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).
- Sahide, M.A.K. et al. (2020) 'The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes', *Forest Policy and Economics*, 120, p. 102290.
- Suryaningsih, S., & Zamhasari, Z. (2024). Menghadapi Tantangan: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(3), 269-284.
- Semiawan, C.R. (2010) *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Sudarni, Farisa Syafitri, N.C.T. (2024) 'Kemitraan Otentik Pendamping dalam Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), pp. 145–165.
- Toha, M. and Wihadanto, A. (2023) 'Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan dalam menjaga kelestarian hutan , namun sayangnya memenuhi kebutuhan hidupnya , ditambah', *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 7(2), pp. 17–25.
- Warawarin, A.M., Ungirwalu, A. and Lense, O.N. (2024) 'Analysis of the Success of Social Forestry Stages and Village Forest Development Strategies in Kayauni Sub-district , Fakfak , West Papua Province', *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*, 10(1), pp. 11–31.
- Yulia, I.A. et al. (2024) 'Pelatihan Pembuatan Konten Promosi Wisata dalam Rangka Penguatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan Kelompok Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Potensi Wisata di Kabupaten Garut', *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 5(2), pp. 426–434.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner dan Instrumen Wawancara

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KUPS MADU KTH MEGA BUANA DESA PACEKKE KABUPATEN BARRU

A. Identitas Responen

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur/Usia :
Alamat :
Lama Menetap :
Jumlah Anggota Keluarga :
Pekerjaan :
-Pokok :
-Sampingan :
Pendidikan :
Status Penduduk :
Jenis Komoditi :
Luas Lahan :

B. Tahapan PS

Berikut daftar pertanyaan koesioner bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari Tahapan Perhutanan Sosial yang ada di KUPS Madu KTH Mega Buana. Skor untuk pertanyaan yaitu skor 5 (Sangat tahu/sangat setuju/sangat baik/sangat sering/sangat perlu), skor 4 (Tahu/setuju/baik/sering/perlu), skor 3 (Netral), skor 2 (Tidak tahu/tidak setuju/tidak baik/tidak sering/tidak perlu), skor 1 (Sangat tidak tahu/sangat tidak setuju/sangat tidak baik/sangat tidak sering/sangat tidak perlu):

1. Pendampingan Tahapan Awal

| Pertanyaan | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|---|---|---|---|---|
| Apakah ada Sosialisasi tentang PS dan Ijin PS? | | | | | |
| Apakah memahami materi sosialisasi PS? | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Apakah pernah dilakukan inventarisasi potensi? | | | | | |
| Apakah pernah dilakukan identifikasi potensi Dampak Lingkungan dan Sosial? | | | | | |
| Apakah potensi hasil utama yang ada bisa dikembangkan? | | | | | |
| Apakah sejak awal sudah dibentuk KTH di kampung? | | | | | |
| Apakah dilibatkan perempuan dalam kepengurusan KTH? | | | | | |
| Apakah tahu luasan dan letak Hutan Kemasyarakatan yang diusulkan? | | | | | |
| Apakah tahu siapa yang menanda-tangani Surat Permohonan Hutan Kemasyarakatan yang diketahui Kepala Kampung? | | | | | |
| Apakah tahu tentang Penetapan dan penerimaan SK pembentukan KTH? | | | | | |
| Apakah sudah ada AD/ART Kelompok KTH? | | | | | |
| Apakah sudah ada potensi unggulan yang akan dikembangkan di kampung? | | | | | |
| Apakah ada sosialisasi tentang Kelompok Usaha Perhutanan Sosial? | | | | | |
| Apakah dilibatkan perempuan dalam pengurusan KUPS? | | | | | |
| Apakah sudah ada komoditas utama yang akan dihasilkan? | | | | | |
| Apakah ada Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia dari KTH-KUPS? | | | | | |

2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan dan lingkungan

| Pertanyaan | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|---|---|---|---|---|
| Apakah sudah dilakukan penandaan batas lokasi ijin PS? | | | | | |
| Apakah sudah dilakukan pembuatan dan penandaan ruang/zonasi? | | | | | |
| Apakah sudah dilakukan Penyusunan RKPS dan RKT? | | | | | |

3. Kerja sama dan akses permodalan dan akses pasar

| Pertanyaan | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apakah ada kerjasama dengan para pihak selama ini? | | | | | |
| Apakah ada bantuan modal, peluang modal, Alat Ekonomi Produktif (AEP) selama ini? | | | | | |
| Apakah ada akses pasar dan jejaring usaha selama ini? | | | | | |
| Bagaimana dukungan keberlanjutan APBK, APBD, APBN, LSM, dan Para Pihak? | | | | | |

4. Pengelolaan pengetahuan

| Pertanyaan | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apakah ada pengelolaan pengetahuan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pendokumentasian, publikasi media)? | | | | | |
| Apakah ada fasilitasi pendampingan (pelatihan/kursus/diklat) dari para pihak? | | | | | |
| Apakah ada produk yang sudah dihasilkan selama ini? | | | | | |

5. Monitoring dan evaluasi

| Pertanyaan | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|---|---|---|---|---|
| Apakah ada Monitoring dan Evaluasi bersama para pihak? | | | | | |
| Apakah peran pendamping berjalan dengan baik di kampung? | | | | | |
| Apakah perlu pendampingan rutin dan berkelanjutan serta money bagi KTH-KUPS? | | | | | |

C. Strategi pengembangan KUPS Madu sari

Berikut ialah intrumens wawancara untuk mengetahui stratrgi pengembangan KUPS Madu KTH Mega Buana, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Barru. Bagaimana kegiatan kelompok tani hutan khususnya di KUPS Madu dari segi:

a. Pengembangan masyarakat

1. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelolah hutan?
2. Apa strategi efektif untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis hutan yang berkelanjutan?
3. Bagaimana cara meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan pasar?

- b. Pengelolaan Hutan
 - 1. Bagaimana cara mengembangkan system pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat?
 - 2. Apa strategi efektif untuk mengurangi konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan dalam pengelolaan hutan?
 - 3. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan?
- c. Kebijakan dan Regulasi
 - 1. Bagaimana cara mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan Perhutanan Sosial?
 - 2. Apa strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan?
 - 3. Bagaimana cara mengintegrasikan prinsip-prinsip perhutanan sosial dalam kebijakan dan regulasi yang ada?
- d. Monitoring dan Evaluasi
 - 1. Bagaimana cara mengembangkan system monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan pengembangan Perhutanan Sosial?
 - 2. Apa indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengembangan Perhutanan Sosial?
 - 3. Bagaimana cara mengintegrasikan hasil monitoring dan evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pengembangan perhutanan sosial?
- e. Kendala dan Akses Modal
 - 1. Apa saja kendala yang bapak/ibu ketahui terkait pengelolaan Perhutanan Sosial dari aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekologi?
 - 2. Apa saja sumber akses modal yang tersedia bagi masyarakat yang terlibat dalam program perhutanan sosial?
 - 3. Sejauh mana peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung akses modal untuk program perhutanan sosial?
 - 4. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses modal untuk kegiatan perhutanan sosial, dan bagaimana cara mengatasinya?

Lampiran 2. Data Responden

| Nama | Jenis Kelamin | Umur | Jumlah Anggota Keluarga | Pekerjaan | Pendidikan | Jenis Komoditi | Luas Lahan |
|---------------|---------------|-------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|
| Basineng | Laki-laki | 59 th | 3 Orang | Petani | SMP | Cengkeh, kemiri | 1 Ha |
| Tare (Muktar) | Laki-laki | 40 th | 3 Orang | Petani | SD | - | - |
| Abd. Rauf | Laki-laki | 50 th | 4 Orang | Petani | SD | Kemiri | 1 Ha |
| Sineng Suma | Laki-laki | 45 th | 5 Orang | Petani | SD | - | - |
| Cambohong | Laki-laki | 61 th | 3 Orang | Petani | - | Kemiri | 1 Ha |
| Hasanuddin | Laki-laki | 60 th | 4 Orang | Petani | SD | Kemiri | 1 ha |
| Asri | Laki-laki | 55 th | 5 Orang | PNS | S2 | Kemiri, Kopi, Merica | 0,75 Ha |
| Bakri | Laki-laki | 50 th | 4 Orang | Petani | SD | Kemiri | 1 Ha |
| Bahar Sunu | Laki-laki | 45 th | 4 Orang | Petani | SD | Kemiri | 20 Are |
| Mansyur | Laki-laki | 46 th | 5 Orang | Petani | SD | Kemiri | 1 Ha |
| Asri Z | Laki-laki | 51 th | 5 Orang | Petani | SD | Kemiri, Cengkeh | 2 Ha |
| Aminuddin | Laki-laki | 48 th | 4 Orang | Petani | SD | Kacang | 0,5 Ha |
| Tame Hasna | Laki-laki | 41 th | 4 Orang | Petani | SMP | Kemiri | 0,5 Ha |
| Nanda | Laki-laki | 66 th | 1 Orang | Petani | - | Kemiri, Cengkeh, Kopi, Porang | 1 Ha |
| Basiri | Laki-laki | 50 th | 2 Orang | Petani | - | Kemiri, Cengkeh | 0,5 Ha |

Lampiran 3. Data Hasil Kuesioner

| | Pendampingan Tahap Awal | | | | | | | | | | | | | | | | Pengel Kerjasan | | | | Pengel Monit | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--|--|--|
| Nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| Basineng | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | | |
| Tare (Muktar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | |
| Abd. Rauf | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | | | | |
| Sineng Suma | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | |
| Cambohong | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | | | | |
| Hasanuddin | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | | | | |
| Asri | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Bakri | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | |
| Bahar Sunu | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Mansyur | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | |
| Asri Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | |
| Aminuddin | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | |
| Tame Hasna | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | | | |
| Nanda | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Basiri | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | | | |
| Jumlah | 712 | | | | | | | | | | | | | | | | 132 | | | | 198 | | | | 145 | | | | 167 | | | |

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masaia Lt. 1-Jl. H. Andi Iskandar Uruu
<https://dpmptspk.barrukab.go.id> : e-mail : dpmptspk.barru@gmail.com .Kode Pos 90711

Barru, 07 Juli 2025

Nomor : 361/IPDPMPTSP/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepala
Yth. Kepala Desa Paccekke Kec. Soppeng Rinja

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel Nomor : 12330/S.01/PTSP/2025 tanggal, 06 Juni 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kharsuni Khotibuh
Nomor Pokok : 105354615956
Program Studi : Kehutanan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Dusun III Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Larau Timur

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Sandana yang berlangsung mulai tanggal 07 Juli 2025 s/d 07 Agustus 2025, dalam rangka penyusunan Skrripsi, dengan judul:

**ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN KUPS MADU KTH MEGA BUANA DESA PACCEKKE
KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menghormati kegiatan dimaksud dengan ketetapan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menanti semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan aplikasi yang diterbitkan BSS



Lampiran 5. Surat Selesi Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN BARRU
DESA PACCEKKE**

Alamat: paccekke, Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja kode pos 90732

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 000.9.6.1/ /PA /Desa Paccekke

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. DAHLAN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Desa Paccekke

Menerangkan :

Nama : KHUSNUL KROTIMAH

Nomor Pokok : 105354615956

Program Studi : Kehutanan

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Alamat : Dusun III Desa Kanawatu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur

Telah selesai melakukan penelitian / Pengambilan Data di wilayah Desa Paccekke yang berlangsung mulai tanggal 07 Juli 2025 s/d 14 Juli 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN KUPS MADU KTH MEGA BUANA DI DESA PACCEKKE
KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paccekke, 14 Juli 2025


MUH. DAHLAN, S.Sos., M.Si

Lampiran 6. Surat Bebas Plagiasi

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp (0411) 866972, 841583, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Memerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
Nim : 105951104921
Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 7% | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 13% | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 7% | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 9% | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 8% | 10 % |
| 6 | Bab 6 | 4% | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 06 Agustus 2025
Mengetahui
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


M.P.
1001961591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
Telepon (0411)866972,861 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

Scanned with CamScanner

Lampiran 7. Hasil Uji Plagiasi



BAB II Khusnul Khotimah 105951104921

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

14% LULUS 2%

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

bajangjournal.com
Internet Source

8%

2

repository.unhas.ac.id
Internet Source

3%

3

etd.ummy.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches



BAB III Khusnul Khotimah 105951104921

ORIGINALITY REPORT

7% SIMILARITY INDEX
4% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Papua Student Paper 3%
- 2 www.tectonagrande.com Internet Source 2%
- 3 etd.lain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source 2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On

BAB IV Khusnul Khotimah 105951104921

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



na-elina.blogspot.com
Internet Source

3%



Submitted to Universitas Negeri Padang
Student Paper

2%



repository.radenintan.ac.id
Internet Source

2%



www.pustakawanbaru.com
Internet Source

2%

Exclude quotes



Exclude bibliography



Exclude matches



Scanned with CamScanner

BAB V Khusnul Khotimah 105951104921

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

On

On

Exclude matches



| | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------------------|---|---|------|---|------|
| 34 | CHAMBERS | GEOMATIKA DAN INFORMATIKA KEHUTANAN | 3 | A | 100% | 1 | 2022 |
| 33 | | | | | | | 22 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

BAB VI Khusnul Khotimah 105951104921

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



vdocuments.mx
Internet Source

4%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches



Scanned with CamScanner

Lampiran 8. SK Pembentukan KTH Mega Buana


1 2 0 1 6 1 2 2 1 0 0 0 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

KEPUTUSAN
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor : / A.13/P/PT/11/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM)
KEPADA KELOMPOK TANI MEGA BUANA

SELUAS ± 150 (SERATUS LIMA PULUH) HEKTAR PADA HUTAN LINDUNG
DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RAJA KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang

Mengingat

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-III/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, maka Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan setelah memperoleh fasilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada KELOMPOK TANI MEGA BUANA seluas ± 150 (SERATUS LIMA PULUH) HEKTAR pada HUTAN LINDUNG DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RAJA KABUPATEN BARRU Provinsi Sulawesi Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Barru, 27-10-2016

 J. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448236
Website : <http://p2t.bkpmnd.sulselprov.go.id> Email : p2t_prov.sulsel@yahoo.com
Makassar 90122



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4695) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.86/Menhut-III/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);
12. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.434/Menhut-III/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.1351/MenLHK-III/2015 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.780 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2078/X/Tahun 2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BKPM Provinsi Sulsel;

Memperhatikan

1. Surat Ketua Kelompok Tani Hutan MEGA BUANA Nomor : 007/KT-H/MBU/2018 tanggal 13 Juni 2018 perihal Pemohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM)
2. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 522/1300/III.3/DISHUT tanggal 20 September 2018 tentang Perimbangan Teknis Pembelian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) di Kabupaten Barru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) kepada:
- | | |
|---------------------|---|
| Kelompok Tani Hutan | : KELOMPOK TANI MEGA BUANA |
| Luas Areal | : ± 150 (SERATUS LIMA PULUH) HEKTAR |
| Alamat | : Desa Pacoekke, Kecamatan Soppeng Raja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan |
| Fungsi Kawasan | : KAWASAN HUTAN LINDUNG |
| Jumlah Anggota | : 60 (Enam Puluh) Orang |

KEDUA

- Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) dan Daftar Anggota Kelompok Tani Hutan merupakan bagian dari Keputusan ini sebagaimana terlampir.

SIMP BKPM 27-10-2018



Jl. Boegerville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 449636
Website : <http://p2btkpm.sulselprov.go.id> Email : p2btkpm.sulsel@yahoo.com
Makassar 90222



- KETIGA** Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) sebagaimana dimaksud dalam KESATU, bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan dan dilarang dipindahtangikan, dipunkan atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan;
- KEEMPAT** Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) ini diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** Setelah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), Kelompok Tani Hutan menyusun Rencana Kerja Hutan Kemasyarakatan yang terdiri dari:
1. Rencana Umum
 2. Rencana Operasional
- KEENAM** Kegiatan pokok pemanfaatan areal kerja pada hutan lindung yang diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/ Menhut-IV/ 2014, meliputi:
- a. Pemanfaatan kawasan pada Hutan Lindung, dilakukan antara lain meliputi:
 1. budidaya tanaman obat
 2. budidaya tanaman hias
 3. budidaya jamur
 4. budidaya lebah
 5. budidaya pohon serbaguna
 6. budidaya burung walet
 7. penangkaran satwa liar
 8. rehabilitasi hijauan makanan ternak
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
 1. pemanfaatan jasa aliran air
 2. wisata alam
 3. perlindungan keanekaragaman hayati
 4. pengelamatan dan perlindungan lingkungan
 5. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon
 - c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:
 1. rotan
 2. bambu
 3. madu
 4. getah
 5. buah
 6. jamur
 - d. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam Hutan Kemasyarakatan dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani dengan strategi tajak untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.
- KETUJUH** Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/ Menhut-IV/ 2014 adalah:
- a. Hak pemegang IUPHKM pada Hutan Lindung
 1. mendapat fasilitasi
 2. melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan
 3. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan
 4. melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu
 - b. Kewajiban pemegang IUPHKM:
 1. Melakukan penataan batas areal kerja kelompok
 2. Menyusun rencana kerja
 3. Melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan
 4. Membayar iuran Izin dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas hasil hutan bukan

SNKAT.BUPAD 27-10-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441 077 Fax. (0411) 448908
Website : <http://ptbkmnd.suhelprv.go.id> Email : ptbkmnd@yahoo.com
Makassar 90222



kayu dan jasa lingkungan sesuai ketentuan

5. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada pemberi izin

KEDELAPAN

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) dapat diberikan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dikurs KETUJUH point b Keputusan Gubernur ini

KESEMBIHAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal : 04 NOV 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA LAGU KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Koordinator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMN, SE., MS.

Jabatan : Pembina Utama Madya

Np. 10610513 109002 1 002

Terselusan YB:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2. Direktur Jenderal PDMS, Kementerian LH dan Kehutanan
3. Direktur Jenderal PPLH, Kementerian LH dan Kehutanan
4. Direktur Jenderal PPLH, Kementerian LH dan Kehutanan
5. Direktur Jenderal PPLH, Kementerian LH dan Kehutanan
6. Bupati Barru
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barru
9. Kepala Balai PDAS, Lingsubang Siasang
10. Kepala Balai PPLH, Ulu, Sulawesi
11. Kepala BPHM, Ulu, Makassar
12. Kepala BPHM, Ulu, Makassar



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : //L.13.P/P.17/11/ 2016

TANGGAL : 04 NOV 2016

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN MEGA BUANA
 PENERIMA IJIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (IUPHKM)
 DESA PACCEKKE KECAMATAN SOPPENG RIJA KABUPATEN BARRU
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

| No | Nama | Keterangan | Pekerjaan | Alamat | Umur |
|----|--------------|------------|-----------|----------|------|
| 1 | Nanda | Ketua | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Dahlan | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 5 | Tangga | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 6 | Samrang | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 7 | Poddang | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 8 | Cambohong | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 9 | Sa'ma | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 10 | Masa | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 11 | Salma | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 12 | Bekri | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 13 | Sineng Sura | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 14 | Nurman | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 15 | Hasanudin | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 16 | Tams Hasanah | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 17 | Tarui | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 18 | Lasepe | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 19 | Mahmuddin | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 20 | Bahitua | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 21 | Tasse | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 22 | Ladeng | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 23 | Rauvid | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 24 | Amuruddin | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 25 | Caraba | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 26 | Bahar Seta | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 27 | Pinta | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 28 | Lawali | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 29 | Basueng | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 30 | Sapardin | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 31 | Suberman | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 32 | Basri S. | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 33 | Laraba | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 34 | Talang | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 35 | Lalade | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 36 | Pating | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 37 | Azi Z. | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 38 | Berui | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |
| 39 | Tala | Anggota | Petani | Paccekke | 2,5 |

| No | Nama | Keterangan | Pekerjaan | Alamat | Umur |
|--------------|--------------|------------|-----------|---------|------|
| 40 | Behar Lebba | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 41 | Abd. Rauf | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 42 | Tamin | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 43 | Laodding | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 44 | Kistan | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 45 | Mallawa | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 46 | Ladua | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 47 | Abd. Hamid | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 48 | Tara | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 49 | Mansyur | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 50 | Behar Sum | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 51 | Janjang | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 52 | Lagris | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 53 | Ribe Kumi | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 54 | Awung | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 55 | Bahendia | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 56 | Rudi | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 57 | Razi | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 58 | Sukarna | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 59 | Syaifuluddin | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| 60 | Edhy | Anggota | Petani | Pacekke | 2,5 |
| Jumlah Total | | | | | 150 |

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Setoran Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu,

A.M. YAMIN, SE, M.S
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 196105131990021002

Lampiran 9. SK Pembentukan KUPS Madu KTH Mega Buana

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Paccekke
 Nomor : 03 Tahun 2021
 Tanggal : 27 Januari 2021

**KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
 MADU PACCEKKE KTH MEGA BUANA**

Pusun Paccekke Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Raja Kabupaten Barru

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)

| No | Nama | Alamat | Jabatan | NIK |
|----|-----------------|----------|------------|------------------|
| 1 | Basineng ✓ | Paccekke | Ketua | 7311042011710002 |
| 2 | Tare (Muhtar) ✓ | Paccekke | Sekretaris | 7311043011870001 |
| 3 | Abd. Rauf ✓ | Paccekke | Bendahara | 7311043011600002 |
| 4 | Sineng Suma ✓ | Paccekke | Anggota | 7311040102850003 |
| 5 | Cambohong ✓ | Paccekke | Anggota | 7311040107550009 |
| 6 | Hasanuddin ✓ | Paccekke | Anggota | 7311040118630003 |
| 7 | Asri ✓ | Paccekke | Anggota | 7311040212700001 |
| 8 | Bakri ✓ | Paccekke | Anggota | 7311042908670001 |
| 9 | Behar Sunu ✓ | Paccekke | Anggota | 7311041708700002 |
| 10 | Mansyur ✓ | Paccekke | Anggota | 7311043112780006 |
| 11 | Asri Z ✓ | Paccekke | Anggota | 7311042702730001 |
| 12 | Aminuddin ✓ | Paccekke | Anggota | 7311041212730001 |
| 13 | Tame Hasna ✓ | Paccekke | Anggota | 7311041712720002 |
| 14 | Abd. Hamid ✓ | Paccekke | Anggota | 7311043112590035 |
| 15 | Nanda ✓ | Paccekke | Anggota | 7311041312590001 |
| 16 | Basiri ✓ | Paccekke | Anggota | 7311043112560005 |
| 17 | Bahar Sena ✓ | Paccekke | Anggota | 7311041002710001 |

Kepala Desa Paccekke

 MUHAMMAD DAHLAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PACCEKKE TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) MADU PACCEKKE KTH MEGA BUANA
- KESATU : Menetapkan/mengakui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada KTH MEGA BUANA Desa Pacceke Jenis usaha Lebah Madu dengan Struktur Keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacceke
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Kepala Desa Pacceke



**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
PADA KTH MEGA BUANA
DESA PACEKKE KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyepakati pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada KTH MEGA BUANA Desa Pacekke dengan struktur organisasi berikut :

Ketua
Sekretaris
Bendahara

: Nanda
: Mardihan
: Asri

KUPS
Ketua
Sekretaris
Bendahara

: MADU PACCKE KTH MEGA BUANA
: Basineng
: Muhtar
: Abd. Rauf

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan dalam kesepakatan dalam pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini akan dimusyawarahkan kembali.

Dibuat di : Pacekke
Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Ketua KTH Mega Buana,

Sekretaris KTH Mega Buana,



MARDIHAN

Mengetahui :
Kepala Desa Pacekke

MUHAMMAD DAHLAN

Lampiran 10. Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Pengurusan Surat Penelitian



Dokumentasi Observasi



Dokumentasi Wawancara Kuesioner



Z















BIODATA PENULIS



Nama lengkap Husnul Khotimah, Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Nim: 105951104921, tempat tanggal lahir di Palopo, 19 Juni 2002. Alamat Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Riwayat pendidikan, TK Titian Ilmu Desa Kanawatu (2007-2008), SDN 168 Tapparan II Tanah Toraja (2008-2014), SMPN 3 wotu (2014-2017), SMAN 10 Luwu Timur (2017-2020). Penulis anak ke-4 dari 5 bersaudara, penulis memiliki hobi memancing dan suka kucing. Selama masa kuliah penulis aktif berorganisasi dan ikut perlombaan berikut riwayat keorganisasian dan prestasi penulis:

A. Keorganisasian

1. Departemen Bidang Kaderisasi Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Pertanian (PIKOM IMM FP) Universitas Muhammadiyah Makassar 2022-2023
2. Anggota Bidang Penelitian dan Penalaran (PENA) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA) Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2022-2023
3. Ketua Bidang Kajian dan Penalaran Himpunan Mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian (HMK-FP) Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2022-2023
4. Wakil Sekretaris Umum UKM Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Penelitian dan Penalaran (LKIM-PENA) Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2023-2024
5. Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar Periode 2023-2024
6. Ketua Bidang Kaderisasi Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwu Timur Periode 2025-2026

B. Prestasi

1. Bets PKM, pada Kegiatan Outdoor Diklat Ilmiah XVI UKM LKIM-PENA Unismuh Makassar 2022
2. Peserta Nahdlatul Ulama' Fair National Essay Competition 2022 Universitas Jember
3. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Tingkat ISMPI Wilayah V 2023
4. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Faperta FAIR 3 Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Wathan dan Yayasan Riski Prima sentosa 2023
5. BRONZE MEDAL for their Business Idea Youthpreneur in Action International Business Idea Competition Podomoro Univesity 2023
6. Peserta PROGRAM WIRAUSAHA MERDEKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Angkatan Ke-2 Tahun 2023

7. Penerima dana Hibah PKM-PM 2023 KEMENDIKBUDRISTEK
8. Juara 1 Lomba Gagasan Futuristik Mahasiswa pada kegiatan Momen Mahasiswa Generasi Einstein Unismuh Makassar (MOMENTUM NASIONAL 2024) dengan tema “Kontribusi iGeneration dalam Pengembangan Fisika Abad 21” yang di selenggarakan oleh Himaprodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar periode 2023-2024 pada tanggal 01-08 Agustus 2024
9. Tim Pelaksana Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) 2024 yang dilaksanakan pada Juni-Oktober 2024, diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
10. Has achieved as Participant of Essay Writing Competition in International Student Competition In Asia Organized by Universitas Muhammadiyah Buton, in collaboration with Universiti Putra Malaysia, Fotani Universiti In 23 August-14 September 2024 Given this 15th of September 2024 at Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau city, Indonesia
11. Magang Bersertifikat Angkatan 7
12. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 7 JaLan MaPan (Jelajah Hutan Masa Depan) Perhutanan Sosial 6 September s/d 31 Desember 2024, Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

